



KOMPILASI PRAKTIK BAIK

Pemerintah Daerah di Indonesia untuk Bangkit dan Atasi Pandemi

A COMPILATION OF BEST PRACTICES

for Local Governments to Recover from and Overcome the Pandemic

Buku ini berisi deskripsi kisah sukses atau praktik dari provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia dalam mengatasi dampak COVID-19, dan kaitannya dengan target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Selain buku ini, LOCALISE SDGs juga menghasilkan dua buku lain, yaitu Buku Saku untuk Pemerintah Daerah dan Buku Saku untuk Anggota DPRD.

This book presents success stories and good practices from provinces, cities, and regencies in Indonesia in addressing the impacts of the COVID-19 pandemic, and its linkages with SDGs targets. Apart from this book, LOCALISE SDGs has produced two other pocket books: a Pocketbook for Local Governments and a Pocketbook for Local People's Representative Council (DPRD).



Buku saku ini disusun dengan dukungan finansial dari Uni Eropa melalui proyek Leadership Ownership and Capacities for Agenda 2030 Local Implementation and Stakeholder Empowerment (LOCALISE SDGs) yang dilaksanakan oleh United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC), bekerja sama dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). LOCALISE SDGs turut melibatkan asosiasi pemerintah daerah lainnya di Indonesia seperti Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI).

Materi publikasi ini diproduksi dengan bantuan hibah dari Uni Eropa. Pendapat/pandangan yang dinyatakan dalam materi publikasi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab SDGs Center UNDIP, UCLG ASPAC dan APEKSI, dan bukan mencerminkan pendapat/pandangan Uni Eropa.

®

Foto Sampul:

Belajar informal di luar ruangan saat pandemik. Inisiatif yang dilakukan warga Kab. Bandung dalam hal pendidikan informal pada saat pandemi. Sekelompok warga di Desa Cikoneng, Kab. Bandung belajar diluar ruangan bersama kelompok kecil ditengah masa sekolah yang masih menerapkan sistem belajar daring. Inovasi ini penting dilakukan untuk menghilangkan kebosanan, namun tetap menjaga protokol kesehatan.

Fotografer: Bastian AS & Tim



Didukung oleh pendanaan hibah dari/Financially supported by:



Didukung oleh/supporter by:



kontributor/contributors:



Sekretariat UCLG ASPAC, Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Gedung H, Lantai 21, Jl. Medan Merdeka Selatan No.8-9 Jakarta 10110, Indonesia, Tel. (62-21) 389 01801 Fax. (62-21) 389 01802, Email: secretariat@uclg-aspac.org, Website: www.uclg-aspac.org

This pocketbook was prepared as part of the Leadership Ownership and Capacities for Agenda 2030 Local Implementation and Stakeholder Empowerment (LOCALISE SDGs) project implemented by the United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) in 30 local governments (16 provinces and 14 cities), in cooperation with the Association of Indonesian Municipalities (APEKSI) with the financial support of the European Union. LOCALISE SDGs also involves other associations of local authorities in Indonesia such as the Association of Indonesian Provincial Governments (APPSI), the Association of Indonesian District Governments (APKASI), the Association of Indonesian Regency Legislative Councils (ADKASI), and the Association of Indonesian Municipal Councils (ADEKSI).

This publication was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of UCLG ASPAC and APEKSI and do not necessarily reflect the views of the European Union.

®

Cover Photo:

Outdoor informal learning during the pandemic. A group of residents of Cikoneng Village, Bandung Regency study in small groups outdoor. This method is done during the implementation of the online learning system. This innovation is important to eliminate boredom and maintain learning effectiveness, while still implementing health protocols.



Landmark taman Kota malang yang disebut balaikota atau Tugu Balaikota. Malang merupakan kota dingin dan terkenal sebagai kota pelajar di Jawa Timur.

Foto: Bastian AS & Tim



Kompilasi Praktik Baik

Pemerintah Daerah di Indonesia untuk Bangkit dan Atasi Pandemi

A Compilation of Best Practices

for Local Governments to Recover from and Overcome the Pandemic



Tim Peneliti/*Team of Researchers:*

SDGs Center Universitas Diponegoro (SDGs Center UNDIP)/*SDGs Center of Universitas*

Diponegoro (SDGs Center UNDIP): Rukuh Setiadi, PhD; Prof. Ambariyanto; Prof. Dr. Denny Nugroho Sugianto; Dr. Amirudin; Teuku Afrizal, PhD; Dr. Ing. Wiwandari Handayani; Dr. Diana Nur Afifah; Bulan Prabawani, PhD; Sugiharto, PhD; Mochamad Arief Budihardjo, PhD; Wahyu Widodo, PhD; Salma Zulfa Nadhiroh, ST.

Penyunting Naskah/*Editors:*

Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi, Rahmi Dwi Nydia, Imam Wisaya Surataruna, Aniessa Delima Sari, Rona Ikram Putri

Penerjemah/*Translator:*

Masayu Yulien Vinanda

Kontributor/*Contributors:*

Setyo Budiantoro, Sanjoyo (Sekretariat Nasional SDGs BAPPENAS/*SDGs National Secretariat, National Planning Agency*), Dr. Megandaru W. Kawuryan (Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia/*Association of Indonesian Provincial Governments* – APPSI), Indah Sri Wibi Nastiti, Teguh Ardhiwiratno (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia/*Association of Indonesian Municipal Governments* – APEKSI), H. Lukman Said S.Pd., Syamsu Rizal, SE, M.Si (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia/*Association of Indonesian Regency Legislative Councils* - ADKASI), Didi Sumardi, Tomi Lebang, Arief Ariyanto (Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia/*Association of Indonesian Municipal Councils* - ADEKSI), Aniessa Delima Sari, Hendra Susila Adi, Vidya Kartika, Cemara Dinda (UCLG ASPAC)

Desainer Grafis/*Graphic Designer:*

Yuli Istanto





DAFTAR ISI

Tujuan Buku Saku	4
Kata Pengantar – Duta Besar Uni Eropa	6
Kata Pengantar – UCLG ASPAC	8
Kata Pengantar – BAPPENAS	10
Pembangunan Daerah di Tengah Pandemi COVID-19	14
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	16
Praktik Baik Respons Pembangunan di Daerah	18
Bantuan dan Perlindungan Sosial	18
Bantuan Sosial untuk Ketahanan Pangan di Kota Bengkulu	18
Sistem Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin di Kota Pariaman	20
Penerapan Stimulus Ekonomi	26
Relaksasi Pajak dan Retribusi di Kabupaten Trenggalek	26
Pembebasan Tagihan Layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kota Bengkulu	28
Pemeliharaan Layanan Dasar Masyarakat	30
Telemedicine di Kota Jambi dan Provinsi Maluku	30
Pelayanan Publik secara Daring di Provinsi DKI Jakarta	32
Layanan Desk Konseling bagi Warga (Perempuan dan Anak) di Provinsi Jawa Timur	34
Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat	36
Jogo Tonggo di Provinsi Jawa Tengah	36
Unit Deteksi Aktif dan Unit Edukasi di Kota Bogor	38
Pembukaan Kembali dan Pemulihian Kegiatan Ekonomi	40
Prosedur Standar Kesehatan Wisata Berbasis Masyarakat di Kota Sawahlunto	40
Jogja Pass dan Visiting Jogja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	42
Modernisasi Pasar Rakyat di Kota Semarang dan Provinsi Sulawesi Selatan	44
Pengembangan Sistem Informasi dan Kolaborasi	48
Sistem Informasi untuk Urun Dana (<i>Crowdfunding</i>) di Kota Bogor	48
Forum Kolaborasi Jakarta	52
Radar COVID-19 di Provinsi Jawa Timur	56
PENUTUP	60
REFERENSI	62





TABLE OF CONTENTS

Objectives of the Pocketbook	5
Foreword – The Ambassador of the European Union to Indonesia	7
Foreword – UCLG ASPAC	9
Foreword – BAPPENAS	11
Local Developments during the COVID-19 Pandemic	13
Sustainable Development Goals (SDGs)	15
Best Practices Responses in Local Developments	19
Social Assistance and Protection	19
Social Assistance for Food Security in the City of Bengkulu	19
Social Protection System for People Living in Poverty in the City of Pariaman	21
Application of Economic Stimulus	27
Tax and Retribution Relaxation in the Regency of Trenggalek	27
Complimentary Municipal Waterworks (PDAM) Services in the City of Bengkulu	29
Maintenance of Basic Public Service	31
Telemedicine in the City of and the Province of Maluku	31
Online Public Services in the Province of DKI Jakarta	33
Community (Women and Children) Counselling Desk Service in East Java Province	35
Community Empowerment and Participation	37
Jogo Tonggo in Central Java Province	37
Active Detection Unit and Education Unit in the City of Bogor	39
Reopening and Recovering Economic Activities	41
Health Standard Procedures for Community-Based Tourism in the City of Sawahlunto	41
Jogja Pass and Visiting Jogja Program in the Special Region of Yogyakarta (DIY/Daerah Istimewa Yogyakarta)	43
Modernisation of Traditional Markets in the City of Semarang and South Sulawesi Province	45
Information System Development and Collaboration	49
Information System for Crowdfunding in the City of Bogor	49
Jakarta Development Collaboration Network	53
COVID-19 Radar in East Java Province	57
Closing	61
References	63



TUJUAN BUKU SAKU

Buku Saku (Volume 3) ini berisi deskripsi kisah sukses atau praktik baik dari kota/kabupaten di Indonesia dalam mengatasi dampak COVID-19, dan kaitannya dengan target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Berbagai kisah sukses dalam buku ini diharapkan bisa menginspirasi pemerintah daerah di Indonesia untuk melakukan terobosan dalam menjaga target-target TPB di masa pandemi.

Buku ini diperuntukkan bagi para pengambil keputusan di lembaga eksekutif maupun legislatif. Selain itu, buku ini juga relevan bagi para perencana dan praktisi pembangunan, aktivis pembangunan daerah, dan akademisi.

Buku saku ini mendokumentasikan kisah sukses di 12 kota, kabupaten, serta provinsi di Indonesia dan beberapa negara lain. Ada enam tema utama:

- Bantuan dan perlindungan sosial
- Penerapan stimulus ekonomi
- Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat
- Pemeliharaan layanan dasar masyarakat
- Pembukaan kembali dan pemulihan kegiatan ekonomi
- Pengembangan sistem informasi dan kolaborasi

Selain buku ini, ada dua buku lain yang diproduksi United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC), SDGs Center Universitas Diponegoro (UNDIP), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), yaitu Buku Saku untuk Lembaga Eksekutif (Buku 1) dan Buku Saku untuk DPRD (Buku 2).

Buku 1 berisi langkah-langkah generik yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dalam memulihkan dan menjaga target-target pembangunan daerah di masa pandemi COVID-19. Sementara itu, Buku 2 menjabarkan peran yang bisa diambil oleh DPRD sebagai mitra pemerintah daerah dalam menghadapi dampak COVID-19 bagi pembangunan.

OBJECTIVES OF THE POCKETBOOK

This Pocketbook (Volume 3) comprises the success stories or best practices at the city/regency levels throughout Indonesia in overcoming and managing the impact of the COVID-19 pandemic and its correlation with the targets of Sustainable Development Goals (SDGs).

It is hoped that the various success stories in this pocketbook can inspire local governments, decision-makers in executive and legislative institutions, as well as development planners and practitioners in Indonesia so they can create their own breakthroughs in attaining SDGs targets amidst the pandemic. This book is also relevant to development planners and practitioners, local development parties, and academics.

This pocketbook documents success stories in 12 cities, regencies, and provinces in Indonesia and other countries. The six main themes highlighted are:

- Social assistance and protection
- Implementation of economic stimulus
- Community empowerment and participation
- Maintenance of basic public service
- Reopening and recovering economic activities
- Information system development and collaboration

In addition to this pocketbook, two other books have been produced by the LOCALISE SDGs, which are the Pocketbook for Executive Bodies (Pocketbook 1) and the Pocketbook for Local People's Representative Council or DPRD (Pocketbook 2).

Book 1 outlines the generic steps that can be implemented by local governments to recover and secure local development targets. Meanwhile, Book 2 describes the possible roles that can be assumed by the DPRD through partnerships with local governments to mitigate the impacts of COVID-19 on developments.



Vincent Piket

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia
dan Brunei Darussalam

Selama lebih dari 30 tahun, Uni Eropa telah bermitra dengan Indonesia untuk menjalankan prioritas bersama dan menanggapi tantangan global. Mulai dari perdagangan, investasi dan koneksi, perubahan iklim dan lingkungan, hingga pendidikan, kesehatan, hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintahan yang efektif. Semua upaya tersebut ditujukan untuk menjawab tantangan terkait 17 target pembangunan yang secara global dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). TPB adalah seruan universal untuk bertindak mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi ini dan memastikan bahwa semua orang menikmati perdamaian dan kemakmuran – sebuah dunia dimana tidak ada seorang pun yang tertinggal.

Kami percaya bahwa Indonesia telah memaksimalkan upayanya untuk mencapai TPB pada tahun 2030, dan terus mendorong pertumbuhan hijau yang inklusif. Ini adalah prioritas utama Uni Eropa untuk mewujudkan ekonomi hijau dan sirkular di Eropa. Strategi Uni Eropa disebut Kesepakatan Hijau Eropa (European Green Deal) dan merupakan peta jalan transisi ekonomi hijau berkelanjutan untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2050. Melalui upaya bersama, kita dapat berkontribusi untuk mencapai pembangunan hijau dan berkelanjutan.

Pandemi global COVID-19 telah menghambat berbagai sektor pembangunan seperti kesehatan, pendidikan, dengan ekonomi terkena dampak paling besar – tidak hanya di Indonesia, tetapi di semua negara di dunia.

Akibatnya, aspek-aspek seperti inklusivitas, akses dan pemulihannya perlu dipertimbangkan dengan hati-hati ketika berbicara tentang rencana pembangunan. Hal ini sangat penting mengingat pandemi ini berdampak terutama pada kelompok miskin dan rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, perempuan, anak-anak, migran dan pengungsi.

Pandemi COVID-19 berdampak pada pencapaian TPB. Namun demikian, pandemi menciptakan peluang untuk melakukan penyesuaian kebijakan khususnya dalam mitigasi dampak COVID-19 pada setiap target TPB, terutama di tingkat daerah. Oleh karena itu, Uni Eropa mendukung proyek LOCALISE SDGs yang dilaksanakan oleh UCLG ASPAC bekerja sama dengan APEKSI, yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mengintegrasikan TPB ke dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Buku Saku ini berisi panduan praktis bagi pemerintah daerah untuk mencapai tujuan tersebut. Setiap orang memiliki peran masing-masing: DPRD, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan non-pemerintah.

Saya mengucapkan selamat kepada UCLG ASPAC dan APEKSI atas terbitnya Buku Saku ini dan semoga organisasi-organisasi di seluruh Indonesia dapat memanfaatkannya dengan baik.





Vincent Piket

EU Ambassador to Indonesia
and Brunei Darussalam

For over 30 years, the European Union (EU) has partnered with Indonesia to address joint priorities and global challenges. These range from trade, investment and connectivity, climate change and the environment, to education, health, human rights, and effective governance.

All of these efforts are aimed at responding to challenges related to 17 development targets globally known as the Sustainable Development Goals or SDGs. The SDGs are a universal call to action to end poverty, protect the planet and improve the lives and prospects of everyone, everywhere – a world where no one is left behind.

We believe that Indonesia has maximized its efforts to achieve SDGs by the target of 2030, while also promoting inclusive green growth. It is the EU's top priority to realise a truly green and circular economy in Europe. The European Union's strategy is called the European Green Deal and it sets a path for sustainable green transition bringing us to carbon neutrality by 2050. Through our joint efforts, we can contribute to achieving a green and sustainable development.

The COVID-19 global pandemic has disrupted various development sectors such as health, education, with economy being the most strongly affected – not just in Indonesia, but in all countries around the world.

As a result, aspects such as inclusivity, access and recovery must be considered carefully when talking about development plans. This is especially important considering that the pandemic affects especially the poor and vulnerable groups such as the elderly, persons with disabilities, indigenous peoples, women, children, migrants and refugees.

The COVID-19 pandemic is making it harder to meet the SDGs. Yet it also comes with the opportunities for policy adjustments particularly in mitigating the impacts of COVID-19 on each SDG target, especially at the sub-national level. Therefore, the EU supports the LOCALISE SDGs project implemented by UCLG ASPAC in collaboration with APEKSI, which aims to help local governments in integrating SDGs into their development plans.

This Pocketbook contains practical guidance for local governments for that goal. Everyone has their role to play: the local parliament (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/ DPRD), local governments and non-governmental stakeholders.

I congratulate UCLG ASPAC and APEKSI on the publication of the Pocketbook and wish organisations throughout Indonesia success in putting it to good use.





Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi

Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC

Kami dengan bangga mempersembahkan buku ini sebagai kontribusi nyata UCLG ASPAC melalui LOCALISE SDGs bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Terbentuk pertama kali pada tahun 2004, UCLG ASPAC telah dan terus berupaya mempromosikan pemerintah daerah yang demokratis, mendukung kerja sama antar daerah, serta meningkatkan pengembangan kapasitas pemerintah daerah maupun asosiasinya dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik.

Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah hal yang mutlak. UCLG ASPAC bekerja sama dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota maupun asosiasinya baik eksekutif maupun legislatif melaksanakan LOCALISE SDGs - Leadership, Ownership, and Capacities for Agenda 2030 Local Implementation and Stakeholders Empowerment. Program ini bertujuan memperkuat kapasitas dan fungsi pemerintah daerah dalam mengarusutamakan TPB ke dalam kebijakan dan perencanaan daerah.

Seiring dengan dinamika yang tengah dihadapi daerah di masa pandemi ini, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi aksi “Build Back Better” daerah dalam pencapaian TPB di tengah kesulitan dan keterbatasan yang dihadapi saat ini.

Buku Saku ini berisi praktik baik dari 12 kota, kabupaten, dan provinsi di Indonesia dalam penanganan COVID-19 yang efektif dan keterkaitannya dengan target-target TPB. Sebagai pelengkap dua volume Buku Saku sebelumnya, Buku Saku ini diharapkan dapat menginspirasi daerah dalam mengurangi kerentanan dan, di saat yang sama, membangun ketahanan publik dalam menangani permasalahan fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan begitu, “Building Back Better and Stronger” seyogyanya tidak hanya menjadi jargon belaka.

Perkenankan saya menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan Buku Saku ini, yang merupakan volume ketiga dari rangkaian Buku Saku. Terima kasih kepada SDGs Center Universitas Diponegoro, APEKSI, ADKASI, ADEKSI, dan APPSI yang ikut serta dalam proses penyusunan buku dari tahap perencanaan hingga publikasi. Kepada Sekretariat Nasional SDGs, Bappenas, terima kasih atas masukan konstruktif demi memastikan koherensi Buku Saku dengan instrumen kebijakan di Indonesia.

Sebagai sebuah program, LOCALISE SDGs akan berakhir per Juni 2021, tetapi UCLG ASPAC berkomitmen untuk melanjutkan misi melokalkan TPB, mengingat upaya pencapaian TPB masih terus berlangsung hingga 2030. Di samping itu, COVID-19 masih akan terus menjadi tantangan bagi pembangunan daerah setidaknya dalam beberapa tahun ke depan.

Mari kita terus berupaya, bekerja sama dan bersinergis mengakselerasi pemulihan dampak COVID-19 dan mencapai target TPB di Indonesia. Bersama kita bisa!





Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi
UCLG ASPAC Secretary-General

We proudly present this book as a tangible contribution from UCLG ASPAC through LOCALISE SDGs to local governments across Indonesia. Since it was first initiated in 2004, UCLG ASPAC has continuously made an effort to promote a democratic local government, support the cooperation between local governments, and enhance the capacity building of local governments and their associations in achieving sustainable development in the Asia-Pacific region.

The role of local governments in implementing the Sustainable Development Goals (SDGs) is absolute. UCLG ASPAC has worked together with local governments at the provincial, regency, and city levels as well as the executive and legislative associations to implement LOCALISE SDGs – Leadership, Ownership, and Capacities for Agenda 2030 Local Implementation and Stakeholders Empowerment. This programme aims to strengthen the capacity and function of local governments in mainstreaming SDGs in their policies and plans.

As the local governments face dynamics from this pandemic, it is hoped that this book can be a reference for “Build Back Better” actions in achieving the SDGs in the midst of the difficulties and limitations they are currently facing.

This Pocketbook contains a collection of 12 good practices carried out by local governments in Indonesia in effectively overcoming the impacts of COVID-19, which contributes to efforts to achieve the targets of the Sustainable Development Goals (SDGs). As a complement to the previous two volumes, it is hoped this Pocketbook may inspire local governments in reducing vulnerability and, at the same time, building public resilience in dealing with physical, social, economic and environmental issues. That way, “Building Back Better and Stronger” should not just be a mere jargon.

Please allow me to take this opportunity to express my gratitude towards the various stakeholders involved in the formulation of this Pocketbook, which is the final volume in our series of Pocketbooks. Thank you to the SDGs Center of Universitas Diponegoro, APEKSI, ADKASI, ADEKSI, and APPSI for their involvement in the production process of this book from the planning phase through to its publication. To the SDGs National Secretariat, Bappenas, thank you for your constructive inputs to ensure the coherence of this Pocketbook with policy instruments in Indonesia.

As a programme, LOCALISE SDGs will conclude in June 2021 but UCLG ASPAC will continue the commitment to localising the SDGs, considering that efforts to achieve SDGs will still go on until 2030. Furthermore, COVID-19 will also remain a challenge for local development at least for the next several years.

Let us carry on in our efforts, work together, and synergise to accelerate the recovery from the impacts of COVID-19 and achieve SDGs targets in Indonesia. Together we can!





Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc

Kepala Sekretariat Nasional SDGs,
Kementerian PPN/Bappenas

Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan ridho-Nya, buku saku ini dapat terbit di tengah usaha keras kita menangani pandemi COVID-19. Sekretariat Nasional SDGs menyambut baik disusunnya buku saku ini dalam rangka memandu Pemerintah Daerah dalam merespons penyebaran COVID-19 serta mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Dalam situasi pandemi yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan dan perekonomian negara kita, Pemerintah Pusat dan Daerah membutuhkan strategi baru agar pandemi dapat ditangani sekaligus menjaga momentum pencapaian TPB. Sederet tantangan tengah dihadapi pemerintah seperti penerimaan negara/daerah yang merosot, dan terbatasnya anggaran karena telah direalokasikan ke dalam upaya penanggulangan dampak pandemi COVID-19. Tantangan lainnya adalah perekonomian masyarakat yang menurun, ancaman kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, angka pengangguran dan kemiskinan yang meningkat, dan sederet tantangan lainnya. Dalam kerangka inilah terbitnya buku saku ini menjadi penting untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah dalam melakukan langkah proaktif, untuk menangani pandemi dan memulihkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Bappenas melalui Sekretariat Nasional (Seknas) SDGs telah merevisi metadata indikator TPB yang menjadi acuan dalam memantau dan mengevaluasi pencapaian TPB baik di tingkat nasional maupun daerah. Hasil pemantauan dan evaluasi dari Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB dapat digunakan untuk melihat apakah pelaksanaan TPB di daerah mencapai target. Dalam kondisi pandemi, beberapa target mungkin tidak tercapai, namun tentu saja TPB di daerah harus tetap dilaksanakan. Buku saku ini dapat menjadi pegangan tambahan bagi pemerintah daerah dalam mencari solusi serta menyusun kebijakan di masa pandemi ini.

Seknas SDGs berterima kasih atas dukungan pendanaan dari Uni Eropa dan menghargai upaya UCLG ASPAC dan APEKSI yang telah menyusun buku ini sebagai bentuk kemitraan multi pihak yang bersifat pentahelix. Dukungan dari organisasi internasional yang tercermin dalam penerbitan buku saku ini akan menjadi pelecut semangat pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah dalam menangani dampak pandemi COVID-19 dan melaksanakan TPB.

Pemerintah daerah adalah ujung tombak pelaksanaan TPB sehingga suksesnya daerah dalam pencapaian TPB akan mempengaruhi pencapaian nasional. Oleh sebab itu, Seknas SDGs siap untuk terus mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengakselerasi pencapaian TPB di tengah pandemi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi upaya kita demi kebaikan seluruh rakyat Indonesia.





Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc

Head of SDGs National Secretariat,
National Development Planning Agency

We would like to express our gratitude to God Almighty because of His grace, this pocketbook could still be published in the midst of our great effort in managing the COVID-19 pandemic. The National SDGs Secretariat welcome the putting together of this pocketbook to guide local governments in responding to the spread of COVID-19 and achieving Sustainable Development Goals (SDGs) targets.

During a pandemic that has affected all aspects of life and our nation's economy, the central and local governments require new strategies to effectively manage the pandemic while maintaining the momentum of SDGs achievements. The government are currently faced with a series of challenges, such as diminishing national/local income and an increasingly limited budget for development expenses that have been reallocated towards mitigating the impacts of COVID-19. Other challenges include the decline in society's economic state, health and social welfare concerns, rising unemployment and poverty rates, and a host of other challenges. Based on this framework, the publication of this pocketbook holds great importance in the provision of guidelines for local governments in making proactive steps for better and swifter pandemic management and recovery of society's socio-economic condition.

Through the National SDGs Secretariat, Bappenas have revised the metadata of SDGs indicators that have become a reference point in monitoring and evaluating SDGs achievements at both national and local levels. Results from the Regional Action Plan (RAD) monitoring and evaluation can be utilised to review whether or not SDGs implementation has achieved its targets. In a pandemic, several targets may not be attained, but this should not be an excuse for the implementation of SDGs at the local level to be eased. This pocketbook can become an additional guide for local governments to find solutions and create policies during the pandemic.

The National SDGs Secretariat would like to express their gratitude for the funding support from the European Union and appreciate the tremendous efforts made by UCLG ASPAC and APEKSI in the drafting of this book as a form of multiparty penta-helix collaboration. The support from an international organisation reflected in the publication of this pocketbook will motivate both central and local governments as they attempt to mitigate the impacts of the COVID-19 pandemic and achieve SDGs targets.

Local governments serve as the spearhead in the implementation of SDGs. Hence the successful implementation of SDGs at the local level will greatly influence achievements at the national level. On that account, the National SDGs Secretariat are prepared to continue their support in the efforts of local governments in accelerating the achievement of SDGs during the ongoing pandemic.

May God Almighty bless our efforts for the good of all Indonesians.





PEMBANGUNAN DAERAH DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Setidaknya 148 juta orang terinfeksi dan lebih dari 3 juta jiwa terenggut akibat pandemi COVID-19 setahun setengah berselang sejak *Coronavirus Disease* (COVID-19) pertama tercatat muncul di Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok, pada November 2019 lalu. Sejak itu, pandemi ini telah mengubah tatanan hidup seluruh penduduk dunia secara drastis. Di Indonesia sendiri, per 10 Maret 2021, kurang lebih setahun sejak kasus pertama dinyatakan, sudah tercatat hampir 1,4 juta kasus dan lebih dari 37 ribu jiwa yang menjadi korban.

Pemerintah Indonesia pun masih berupaya menangani dampak COVID-19 yang meluluhlantakkan berbagai sendi pembangunan negara. Selain pemerintah pusat, saat ini hampir 500 otoritas lokal di Indonesia sedang bergulat dengan konsekuensi multi-dimensi yang diakibatkan COVID-19.

Sebelum terjadinya pandemi, kita patut mencatat bahwa pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia masih sangat membutuhkan akselerasi. Pandemi COVID-19 menambah lapisan masalah baru yang bisa memukul mundur semua target TPB yang telah tercapai hingga saat ini.

Pandemi ini secara mencolok mengubah hampir seluruh inti kegiatan pemerintah, di antaranya pemberian layanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan) kepada warga. Semua hal ini sangat penting bagi pencapaian TPB.

Pandemi COVID-19 memaksa pemerintah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, untuk mencari inovasi dan mendorong sistem operasi pemerintah untuk mencapai target-target TPB. Menggunakan pendekatan *business as usual* tak lagi menjadi pilihan. Kita harus menyadari ada cara-cara yang sudah waktunya ditinggalkan, digantikan pendekatan lain yang lebih progresif.





LOCAL DEVELOPMENTS DURING THE COVID-19 PANDEMIC

At least 148 million people have been infected and more than 3 million people lost their lives because of the Coronavirus Disease (COVID-19) after the virus was first recorded in Wuhan, China, in November 2019. Since then, the pandemic has resulted in a significant shift in people's lives and lifestyles worldwide. As of 10 March 2021, around a year after the first case was announced, Indonesia has recorded 1.4 million cases with more than 37,000 fatalities.

The Government of Indonesia is still putting in efforts to tackle the impacts of COVID-19 that have incapacitated various sectors of the country's development. Besides the central government, local authorities are still grappling with the multifaceted impacts caused by COVID-19.

Even before the pandemic, it should be noted that an acceleration to achieve Sustainable Development Goals (SDGs) in the country is still required. The COVID-19 pandemic has only added to the list of issues that could potentially disrupt the progress of SDGs worked on until now.

The pandemic has explicitly transformed nearly all of the government's leading programmes. Amongst them are essential services delivery (education, healthcare, and employment) to citizens. These are important aspects in the realisation of SDGs. The COVID-19 pandemic has forced governments around the world, including Indonesia, to innovate and push operational systems to meet SDG targets. Using a conventional approach is still insufficient to overcome this additional challenge. Therefore, it's time to consider a more progressive approach.



TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)

TPB adalah konsensus pencapaian pembangunan global hingga tahun 2030 yang dibingkai dalam 17 tujuan dan diterjemahkan dalam target-target global, nasional dan lokal yang tetap sejalan.

Implementasi TPB di Indonesia dilakukan melalui kerangka kelembagaan dan hukum di tingkat nasional dan daerah, salah satu di antaranya dengan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan Presiden itu berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah pusat untuk menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) dan pedoman

bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD). Peraturan Presiden juga menjadi acuan bagi organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam implementasi TPB.

COVID-19 berdampak pada hampir semua tujuan pembangunan berkelanjutan. Meski begitu, COVID-19 tidak berdampak terlalu besar pada Tujuan 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, Tujuan 14: Ekosistem Lautan, dan Tujuan 15: Ekosistem Daratan.



TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

1 TANPA KEMISKINAN 	2 TANPA KELAPARAN 	3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA 	4 PENDIDIKAN BERKUALITAS 	5 KESETARAAN GENDER 	6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK
7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU 	8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI 	9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR 	10 BERKURANGNYA KESENJANGAN 	11 KOTA DAN PEMUKIMAN BERKELANJUTAN 	12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB
13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM 	14 EKOSISTEM LAUTAN 	15 EKOSISTEM DARATAN 	16 PERDAMAIAN, KEADILAN, DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH 	17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN 	TUJUAN GLOBAL Untuk Pembangunan Berkelanjutan



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

SDGs are the consensus of global development achievement until the year 2030, represented in 17 goals and translated into aligned global, national, and local goals.

The implementation of SDGs in Indonesia is conducted under institutional and legal frameworks at both national and local levels. One of them is the Presidential Regulation No. 59/2017 on the Implementation of the Achievement of Sustainable Development Goals. This Presidential Regulation serves as a guideline for the national government

to develop National Action Plans (RAN) and local governments to formulate Local Action Plans (RAD). It also functions as a reference for community organisations, philanthropic organizations, businesses, academics, and other stakeholders in implementing SDGs.

The COVID-19 pandemic has affected most SDGs targets. However, it has not impacted much on Goal 9: Industry, Innovation, and Infrastructure, Goal 12: Responsible Consumption and Production, Goal 14: Life Below Water, and Goal 15: Life on Land.



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

1 NO POVERTY 	2 ZERO HUNGER 	3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING 	4 QUALITY EDUCATION 	5 GENDER EQUALITY 	6 CLEAN WATER AND SANITATION
7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY 	8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH 	9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE 	10 REDUCED INEQUALITIES 	11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES 	12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION
13 CLIMATE ACTION 	14 LIFE BELOW WATER 	15 LIFE ON LAND 	16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS 	17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS 	



Gambar 1: Keterkaitan dampak COVID-19 dengan berbagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Sumber: diadaptasi dari data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 2020.



Figure 1: Correlation Between COVID-19 and SDGs



Source: Adapted from United Nations data, 2020



PRAKTIK BAIK RESPONSP PEMBANGUNAN DI DAERAH

Bantuan dan Perlindungan Sosial

BANTUAN SOSIAL UNTUK KETAHANAN PANGAN DI KOTA BENGKULU

TPB Terkait	1 TANPA KEMISKINAN	2 TANPA KELAPARAN	8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	10 BERKURANGNYA KESENJANGAN	17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN
Kelebihan	Memaksimalkan nilai tambah lahan tidur. Membantu penduduk miskin dan penduduk yang kehilangan mata pencaharian.				
Kekurangan	Hasil tidak langsung didapatkan, karena harus menunggu masa panen.				
Efektivitas	Kerja sama antar lembaga, yaitu pemerintah daerah, Komando Distrik Militer (Kodim) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa). Pendataan dan partisipasi pemilik lahan tidur. Bimbingan teknis dari Dinas Pertanian. Partisipasi Babinsa untuk percepatan pelaksanaan program.				
Relevansi	Bagi daerah dengan ketersediaan lahan yang luas di pedesaan.				

Pandemi COVID-19 berdampak besar pada sektor pangan di Kota Bengkulu. Proses produksi dan distribusi pangan terganggu, harga bahan pokok mengalami fluktuasi, dan cadangan pangan semakin berkurang. Bila pandemi terus berlanjut, Kota Bengkulu akan menghadapi ancaman krisis ketahanan pangan.

Untuk merespons masalah ini, Pemerintah Kota Bengkulu berusaha menjamin ketahanan pangan masyarakat dengan cara memanfaatkan lahan tidur dan pekarangan sebagai lahan tanam pangan. Pemerintah kota bekerja sama dengan Komando Distrik

Militer (Kodim), yang sejalan dengan peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) dalam mendukung ketahanan pangan.

Kegiatan ini diawali dengan pendataan lahan tidur dan pekarangan milik masyarakat yang bersedia berpartisipasi. Pendataan dilakukan oleh pihak kelurahan. Lalu, Bintara Pembina Desa (Babinsa) membantu masyarakat dalam proses penanaman bibit. Dinas Pertanian memberikan bimbingan teknis. Petugas dari TNI-AD bertugas menyampaikan bimbingan dan memberi peralatan pendukung untuk penanaman.



BEST PRACTICES RESPONSES IN LOCAL DEVELOPMENTS

Social Assistance and Protection

SOCIAL ASSISTANCE FOR FOOD SECURITY IN THE CITY OF BENGKULU

Related SDGs	1 NO POVERTY	2 ZERO HUNGER	8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH	10 REDUCED INEQUALITIES	17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
Strengths	Maximises the added value of vacant lands. Assists people living in poverty and facing income loss.				
Weaknesses	Delayed benefits due to the need to wait for harvest season.				
Effectivity	Cooperation between organisations, such as local governments, Military District Command (Kodim), and Village Leadership Non-Commissioned Officer (Babinsa). Vacant landowner registration and participation. Technical guidance from the Department of Agriculture. Participation of Babinsa in the acceleration of programme implementation.				
Relevance	For rural regions with vast vacant land areas.				

The COVID-19 pandemic has dramatically affected the food sector in Bengkulu. Production and distribution processes have been disrupted, the prices of staple food have fluctuated, and food supply has decreased. Should the pandemic continue, Bengkulu will face the threat of a food security crisis.

As a response to this situation, Bengkulu's local government have taken measures to ensure food security for the people by utilising vacant lands and yards as agricultural lands. The local government has worked closely with the Kodim on this matter, who

are committed to the same cause as the Indonesian Army (TNI-AD) in supporting food security.

The initial process of this endeavour involved the collection of data by urban village officials on vacant lands and yards owned by people who were willing to participate. The Babinsa then assists the people in sowing seeds under the technical guidance of the Department of Agriculture. Officials from TNI-AD were tasked with supervising the residents and providing supporting equipment.





SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA PARIAMAN

TPB Terkait					
Kelebihan	Jangkauan bantuan yang merata dan luas (sekitar 80 persen dari total kepala keluarga). Hasilnya langsung bisa dirasakan, mengurangi beban masyarakat terdampak.				
Kekurangan	Basis data yang lemah. Belum memaksimalkan penerapan teknologi informasi. Ada risiko penularan COVID-19 saat penyaluran bantuan.				
Efektivitas	Payung hukum telah tersedia. Sinergi program dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Komitmen pemerintah daerah dan pelaksana program di lapangan.				
Relevansi	Relevan bagi semua daerah dan menjadi program wajib.				

Selama pandemi, beban ekonomi masyarakat bertambah. Untuk menanggulangi masalah ini, Pemerintah Kota Pariaman menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Bantuan ini berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kota Pariaman sendiri.

Pemerintah pusat menyediakan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Pariaman menyediakan bantuan dalam bentuk BLT.

Kota Pariaman	
Keterangan	Jumlah Kepala Keluarga (KK)
Penduduk	25.486
Penerima bantuan PKH	2.22
Penerima BLT Kementerian Sosial	4.8
Penerima BLT Provinsi Sumatera Barat	2.142
Penerima bantuan sembako	1.004
Penerima bantuan Pemerintah Kota Pariaman	5.294
Penerima bantuan dari Dana Desa	4.6

Sumber: Siaran Pers Hasil Rapat Finalisasi Penerima Bantuan Sosial (Efaniurza, 2020, ‘Di Balik Pencairan Dana Bansos, Semua Tersalurkan, Bantuan Cair Jelang Lebaran’, URL: <https://posmetropadang.co.id/di-balik-pencairan-dana-bansos-semua-tersalurkan-bantuan-cair-jelang-lebaran/>)





SOCIAL PROTECTION SYSTEM FOR PEOPLE LIVING IN POVERTY IN THE CITY OF PARIAMAN

Related SDGs	    
Strengths	Comprehensive and equal assistance coverage (approximately 80 per cent of households). Direct benefits to lessen the burden of affected communities.
Weaknesses	Weak data. Inadequate application of information technology. High risk of COVID-19 infection during the distribution of aid.
Effectivity	Supporting legal foundation available. Programme synergy between the central government and local governments. The commitment of the local government and on-site programme implementer.
Relevance	Relevant to all regions and is now a mandatory programme.

During the pandemic, the economic burden of the people has increased. To overcome this problem, the local government of Pariaman distributed social aids to communities. The central government mandated these social aids through the Ministry of Social Affairs, the provincial government, and Pariaman's local government.

The central government provided assistance in the form of the Program Keluarga Harapan (PKH) and Direct Cash Aid (BLT). Additionally, the local governments of West Sumatra Province and Pariaman also provided BLTs.

Pariaman City	
Remarks	Number of Households (KK)
Population	25.486
PKH Beneficiaries	2.22
Ministry of Social Affairs' BLT Beneficiaries	4.8
West Sumatera Province's BLT Beneficiaries	2.142
Basic Necessities Care Package Beneficiaries	1.004
Pariaman Government's Assistance Beneficiaries	5.294
Village Fund Beneficiaries	4.6

Source: Press Release of the Result of Meeting on Social Assistance Beneficiary Finalisation (Efanurza, 2020. "Di Balik Pencairan Dana Bansos, Semua Tersalurkan, Bantuan Cair Jelang Lebaran". Retrieved from <https://posmetropadang.co.id/di-balik-pencairan-dana-bansos-semua-tersalurkan-bantuan-cair-jelang-lebaran/>)





Proses penyaluran bantuan dilakukan oleh beberapa lembaga berbeda. PKH dan BLT Kementerian Sosial disalurkan oleh PT Pos Indonesia melalui koordinasi dengan aparat desa. Sementara itu, BLT dari Pemerintah Kota Pariaman disalurkan lewat Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan BLT Dana Desa disalurkan lewat Bank Negara Indonesia (BNI). Untuk memastikan berbagai bantuan ini tidak tumpang tindih, data penerima bantuan dipublikasikan oleh kantor kecamatan dan kantor desa.

Ada beberapa cara yang dilakukan Pemerintah Kota Pariaman untuk memastikan bantuan dari Kementerian Sosial sudah tepat sasaran. Bagi penerima bantuan yang datanya lengkap, penyaluran dana dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Sementara itu, bila alamat penerima bantuan kurang lengkap, bantuan diantar langsung oleh petugas. Terakhir, pemerintah kota juga bekerja sama dengan aparatur desa dan kelurahan untuk menyalurkan bantuan bagi penerima bantuan yang datanya belum jelas.

Bantuan sosial dari Pemerintah Kota Pariaman (dengan dana dari APBD dan Dana Desa) berbentuk dana sebesar Rp 600.000

yang disalurkan selama tiga bulan melalui rekening bank penerima bantuan, sejak bulan April 2020. Pemerintah Kota Pariaman juga memastikan bahwa penerima bantuan ini bukanlah masyarakat yang telah menerima bantuan dari Kementerian Sosial.

Selain bantuan berbentuk dana, ada juga bantuan berbentuk sembako yang diberikan ke 125 KK di Kecamatan Pariaman Utara. Penerima bantuan ini adalah mereka yang terindikasi mengalami penurunan gizi selama pandemi. Bantuan diberikan melalui Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman.





Several different organisations exercised the aid distribution process. PKH and BLT from the Ministry of Social Affairs are distributed by PT Pos Indonesia through coordination with village officials. Meanwhile, the BLTs from the Pariaman Government were distributed through Bank Rakyat Indonesia (BRI), while the Village Fund BLTs were distributed via Bank Negara Indonesia (BNI). To ensure that there were no overlaps, beneficiary data were publicised by the district and village offices.

The local government of Pariaman took several methods to ensure that aids from the Ministry of Social Affairs were delivered accurately. Beneficiaries with complete data received their funds from PT Pos Indonesia. If the address of a beneficiary was incomplete, the aid package was delivered directly by an official. The local government also worked closely with district and village officials in distributing aids to beneficiaries with incomplete data.

The social assistance from the local government of Pariaman (with funds from the Local Budget [APBD] and the Village Funds) amounted to Rp600,000, which was transferred to the beneficiary's bank account

from April 2020 for three months. Pariaman's local government also had to ensure that the beneficiaries were not people who have received aids from the Ministry of Social Affairs.

Besides cash aids, basic necessities care packages were also distributed to 125 households in the North Pariaman district. These beneficiaries were those who have been identified as malnourished during the pandemic. The packages were distributed through Pariaman's Department of Agricultural, Food, and Fishery.





KOTAK 1: PENGALAMAN SERUPA DI KOTA NANTES, PRANCIS.

Kebun Sayuran di Ruang Kota untuk Keluarga Rentan: Selama pandemi COVID-19, aktivitas ekonomi dan sosial terhenti untuk beberapa waktu. Hal ini tentu berdampak pada masyarakat rentan. Ini adalah gejala global yang dialami di banyak kota di berbagai negara, termasuk Kota Nantes di Prancis. Untuk menyiasati masalah ini, Pemerintah Kota Nantes bekerja sama dengan Service of Green Spaces and the Environment (Save) dan Communal Center of Social Action (CCAS) menerapkan Nourishing Landscapes, yaitu program pemanfaatan ruang kota menjadi kebun sayuran. Program ini berhasil menyediakan sayuran secara gratis bagi keluarga yang terdampak pandemi COVID-19.

Program Nourishing Landscapes ini dimulai pada Juni 2020, dengan cara mengubah lahan seluas 1,8 hektar milik pemerintah kota. Para petani dan relawan dari Empower Nantes Association lalu menanami lahan ini dengan sayuran. Ada 50 lahan yang dipakai, di antaranya berupa taman kota, parit kastel, sekolah, taman balai kota, dan area sekitar jalan utama. Departemen Ruang Hijau Kota terus mengembangkan lokasi penanaman, hingga luasnya mencapai 2,5 hektar.

Target pemerintah dalam program ini adalah menyediakan 25 ton sayuran segar. Variasi tanaman disesuaikan dengan musim yang berlangsung. Dengan begitu, lahan ini bisa memproduksi sayuran di setiap pergantian musim. Ada 1000 rumah tangga penerima bantuan yang masing-masing menerima 25 kg sayuran. Selain untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi, program Nourishing Landscapes ini juga bertujuan mengedukasi masyarakat tentang budaya bercocok tanam.

Kelebihan: Memaksimalkan lahan milik pemerintah; membantu masyarakat memenuhi kebutuhan makanan sehat. **Kekurangan:** Hasil tidak langsung didapatkan, karena harus menunggu masa panen.

Efektivitas: Kerja sama antar lembaga (pemerintah kota, asosiasi, relawan, dan petani). **Relevansi:** Bagi daerah dengan ketersediaan lahan yang terbatas. **TPB Terkait:** 1, 2, 10, 12, 17.



BOX 1: SIMILAR EXPERIENCE IN NANTES, FRANCE.

Urban Vegetation for Vulnerable Families: During the COVID-19 pandemic, social and economic activities were temporarily halted, which affected vulnerable people. This is a global phenomenon that occurred in many cities, including Nantes in France. To overcome this problem, the local government of Nantes worked together with the Service of Green Spaces and the Environment (SAVE) and the Communal Center of Social Action (CCAS) to implement Nourishing Landscapes, a programme that utilises urban spaces for vegetable gardens. This programme succeeded in providing free vegetables to families affected by the COVID-19 pandemic.

The Nourishing Landscapes programme was initiated in June 2020 by converting 1.8 hectares of local government land. Vegetables were then planted here by farmers and volunteers from the Empower Nantes Association. A total of 50 lots were utilised, including city parks, castle moats, schools, city square parks, and areas near main roads. The Department of Nantes Green Space has since continued to develop new planting sites until they reach 2.5 hectares in total.

The government's goal with this programme is to provide 25 tons of fresh vegetable produce, with their variety to be adjusted according to seasonal availability. Hence, these lands will be able to produce vegetables every season. There are 1,000 household beneficiaries, each receiving 25 kilograms of vegetables. Besides assisting those who have been negatively affected by the pandemic, the Nourishing Landscapes programme also aims to educate people about vegetable gardening.

Strengths: Maximises government lands, helping communities in meeting nutritional food requirements. **Weaknesses:** Delayed benefit due to the need to wait for harvest season. **Effectivity:** Partnership between organisations (city government, associations, volunteers, and farmers). **Relevance:** Applicable in regions with limited plots of land. Related **SDGs:** 1, 2, 10, 12, 17.





Penerapan Stimulus Ekonomi

RELAKSASI PAJAK DAN RETRIBUSI DI KABUPATEN TRENGGALEK

TPB Terkait	   
Kelebihan	Mengurangi beban ekonomi pelaku usaha. Cakupan jenis usaha yang ditarget sangat luas dan bervariasi.
Kekurangan	Mengurangi pendapatan asli daerah.
Efektivitas	Payung hukum telah tersedia. Komitmen pemerintah daerah dan pelaksana program di lapangan.
Relevansi	Relevan bagi semua daerah dan menjadi program wajib.

Menurunnya aktivitas masyarakat serta penutupan sektor hiburan dan wisata mempengaruhi pendapatan para pelaku usaha di Kabupaten Trenggalek. Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengatasi masalah ini dengan melakukan relaksasi pajak dan retribusi, sesuai arahan pemerintah pusat.

Relaksasi pajak dan retribusi diberlakukan bagi pelaku usaha perhotelan, restoran, tempat hiburan, dan parkir. Pembebasan retribusi juga diterapkan pada sewa lahan dan bangunan, di kios yang dikelola

pemerintah daerah. Selain itu, relaksasi kredit juga diberikan lewat lembaga perbankan, bagi nasabah yang mengalami dampak ekonomi karena pandemi COVID-19.

Rangkaian kegiatan ini dilakukan selama bulan April, Mei, dan Juni 2020. Kegiatan relaksasi pajak dan retribusi ini adalah upaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk menyediakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat.





Application of Economic Stimulus

TAX AND RETRIBUTION RELAXATION IN THE REGENCY OF TRENGGALEK

Related SDGs	1 NO POVERTY	8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH	10 REDUCED INEQUALITIES	17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
Strengths	Reduces economic burden for businesses. Wide variety of business types covered.			
Weaknesses	Reduces locally generated revenue.			
Effectivity	Supporting legal foundation available. The commitment of the local government and on-site programme implementer.			
Relevance	Relevant to all regions and is now a mandatory programme.			

The decrease in people's activities and closures in the entertainment and tourism sectors have greatly affected the revenue of businesses in the regency of Trenggalek. To overcome this problem, Trenggalek's government implemented a relaxation on taxes and retributions as mandated by the central government.

This tax and retribution relaxation applied to hospitality, restaurants, entertainment centres, and parking businesses. Retribution

reprieve was also applied to land and building leases at kiosks managed by the local government. Additionally, credit relaxation was provided via banking institutions for bank customers who were economically impacted by the COVID-19 pandemic.

These series of activities were conducted in April, May, and June 2020 as an effort by Trenggalek's government to provide social safety nets for its residents.





PEMBEBASAN TAGIHAN LAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KOTA BENGKULU

TPB Terkait	    
Kelebihan	Mengurangi beban masyarakat terdampak. Menjamin akses air bersih bagi masyarakat miskin selama pandemi. Durasi bantuan sangat panjang (satu tahun).
Kekurangan	Penurunan bagi hasil daerah dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Efektivitas	Payung hukum telah tersedia. Komitmen bersama antara pemerintahan daerah dan BUMD.
Relevansi	Relevan bagi semua daerah dan menjadi program wajib.

Pembatasan aktivitas yang berlangsung di Kota Bengkulu selama masa darurat COVID-19 menyebabkan turunnya pendapatan masyarakat, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Pemerintah Kota Bengkulu merespons masalah ini dengan memberikan bantuan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kepada masyarakat kurang mampu.

Pemerintah Kota Bengkulu melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) membebaskan tagihan kepada masyarakat

yang termasuk rumah tangga kelas 2A (kelas ekonomi menengah ke bawah). Pembebasan tagihan ini dilakukan selama setahun, dari Maret 2020 hingga Februari 2021. Agar kegiatan terlaksana secara tepat sasaran, Pemerintah Kota Bengkulu memantau langsung ke rumah warga yang terdaftar. Ada 3000 pelanggan PDAM Kota Bengkulu yang mendapat pembebasan tagihan (dengan pemakaian hingga 30 m³).





COMPLIMENTARY MUNICIPAL WATERWORKS (PDAM) SERVICES IN THE CITY OF BENGKULU

Related SDGs	 1 NO POVERTY  5 GENDER EQUALITY  6 CLEAN WATER AND SANITATION  10 REDUCED INEQUALITIES  17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
Strengths	Reducing the burden of affected communities. Ensuring access to clean water for the impoverished during the pandemic. Long-term aid (one year).
Weaknesses	Reducing the income and shared profits of Regional-Owned Enterprises (BUMD).
Effectivity	Supporting legal foundation available. Shared commitment between local government and the BUMD.
Relevance	Relevant to all regions and is now a mandatory programme.

The restriction on activities implemented in the city of Bengkulu during the COVID-19 crisis led to a loss of income for its residents, especially the underprivileged. Bengkulu's government responded to the emergency by providing aids via the BUMD.

Through an agreement with the PDAM, Bengkulu's government moved to make PDAM service charges complimentary for

category 2A households (middle- to lower-income class). This programme ran for a year, from March 2020 until February 2021. To ensure the effectiveness of the programme, Bengkulu's government has opted to make direct observations to registered households. There are 3,000 PDAM customers in Bengkulu that have received complimentary services (with usage up to 30 m³ (cubed)).



Pemeliharaan Layanan Dasar Masyarakat

TELEMEDICINE DI KOTA JAMBI DAN PROVINSI MALUKU

TPB Terkait	    
Kelebihan	Menjamin akses pelayanan kesehatan masyarakat selama pandemi. Membangun alternatif infrastruktur kesehatan. Fasilitas bisa terus dimanfaatkan pasca pandemi.
Kekurangan	Hambatan akses untuk masyarakat miskin yang belum paham teknologi.
Efektivitas	Pembentukan, pemeliharaan, dan stabilitas infrastruktur jaringan. Komitmen pengelola rumah sakit dan dokter.
Relevansi	Relevant khususnya bagi daerah terpencil, pelosok, perbatasan, dan daerah gugus kepulauan, di mana jarak menuju layanan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) atau rumah sakit relatif jauh. Relevant bagi daerah dengan zona hitam atau merah, untuk mengurangi risiko penularan di fasilitas kesehatan.

COVID-19 berdampak besar pada kesehatan masyarakat, terutama komponen masyarakat yang rentan. Selama pandemi, ada penurunan kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas. Karena itu Pemerintah Kota Jambi menerapkan *telemedicine*, yaitu layanan kesehatan yang dilakukan secara daring (*online*).

Telemedicine di Kota Jambi dirintis dalam bentuk Home Care dan layanan terintegrasi Call Center 112. Home Care adalah pelayanan kesehatan dengan cara kunjungan langsung ke rumah pasien. Sementara itu, Call Center 112 adalah nomor panggilan terintegrasi untuk layanan gawat darurat masyarakat, baik itu masalah kesehatan maupun situasi lain seperti kebakaran.

Pemerintah Kota Jambi menerapkan beberapa strategi untuk *telemedicine*. Pertama, dengan menyediakan payung hukum dan infrastruktur jaringan. Kedua, dengan menyediakan

pembentukan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Ketiga, dengan menjamin dukungan dan komitmen dari semua pihak. *Telemedicine* di Kota Jambi ini memastikan masyarakat tetap mendapat pelayanan kesehatan selama masa pandemi.

Sementara itu, layanan *telemedicine* juga dilakukan oleh Provinsi Maluku, yang terletak di area kepulauan. Dengan program ini, pelayanan kesehatan bisa menjangkau area terpencil sekalipun. Saat ini, Pemerintah Provinsi Maluku terus mendorong pelaksanaan *telemedicine* dengan berbagai cara, salah satunya dengan meningkatkan jaringan telekomunikasi ke berbagai area kepulauan. Uji coba untuk *telemedicine* saat ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karel Satsuitubun dan Puskesmas Debut di Maluku Tenggara, serta Puskesmas Hutumuri di Ambon.



Maintenance of Basic Public Service

TELEMEDICINE IN THE CITY OF JAMBI AND THE CITY OF MALUKU

Related SDGs	3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING	5 GENDER EQUALITY	9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE	10 REDUCED INEQUALITIES	17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
Strengths	Ensuring access to public healthcare services during the pandemic. Build alternative healthcare infrastructure. Facilities can be utilised post-pandemic.				
Weaknesses	Access boundaries for the underprivileged who are not familiar with technology.				
Effectivity	Funding, maintenance, and stability of the network infrastructure. The commitment of hospital management and doctors.				
Relevance	Especially relevant for remote areas, border towns, and small archipelagos that are far from healthcare service centres (<i>puskesmas</i>) and hospitals. Relevant to black and red zone areas to reduce the risk of transmission in healthcare facilities.				

COVID-19 has significantly affected the health of the general public, especially vulnerable groups. During the pandemic, there has been a decrease in the number of people visiting healthcare facilities such as *puskesmas*. Therefore, the city government of Jambi decided to implement telemedicine to provide online healthcare services.

The telemedicine service in Jambi was initiated in the form of Home Care with an integrated 112 Call Center. Home Care is a healthcare service enabling direct visits to a patient's abode. At the same time, the 112 Call Center is an integrated helpline for emergency services catering to health issues and other situations, including fire emergencies.

Jambi's city government have implemented several strategies for its telemedicine programme, and they are: 1) preparation of legal foundation and network infrastructure,

2) provision of adequate funds and human resources, and 3) establishing the support and commitment of all parties involved. Jambi's telemedicine programme ensures that the public can still receive healthcare services during the pandemic.

Telemedicine in the Province of Maluku

Telemedicine is crucial for the province of Maluku due to its archipelagic location. With telemedicine, healthcare services can reach even the most remote areas in the province. The provincial government of Maluku are currently pushing for the implementation of telemedicine through several approaches, with the improvement of telecommunication network to various islands being one of them. A trial is currently being carried out at the Karel Satsuitubun Regional Public Hospital (RSUD) and the Debut Puskesmas in South-east Maluku, as well as Hutumuri Puskesmas in Ambon.





Pelayanan Publik secara Daring di Provinsi DKI Jakarta

TPB Terkait	KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI PERDAMAIAN, KADEILAN, DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN
Kelebihan	Sistem layanan publik dapat terlaksana dengan baik selama pandemi. Mengurangi ancaman penularan virus di tengah masyarakat.
Kekurangan	
Efektivitas	Tergantung pada pemeliharaan dan pemutakhiran sistem informasi pelayanan (perizinan dan non perizinan).
Relevansi	Relevan bagi semua daerah.

Pelayanan melalui sistem daring (online) telah digagas oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebelum terjadinya pandemi. Selama masa pandemi, pelayanan ini menjadi salah satu langkah pencegahan penyebaran COVID-19, terutama untuk mengurangi titik kerumunan di fasilitas pelayanan publik. Pelayanan daring selama pandemi ini berjalan cukup efektif. Dalam periode 15 Juni hingga 26 Juni 2020, Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta telah melayani 5.032 pemohon.

Ada beberapa jenis pelayanan publik daring yang diterapkan di DKI Jakarta saat ini. Ada Jakevo, yang bisa diakses melalui situs web dan aplikasi telepon seluler. Sistem ini dipakai untuk memproses permohonan perizinan atau non-perizinan di DKI Jakarta. Lalu, ada sistem Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB),

aplikasi telepon seluler yang menyediakan layanan antar jemput untuk berkas izin usaha. Ada juga *call center* Tanya PTSP 1500164, pelayanan daring dari Dinas Penanaman Modal (DPM) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Selain itu, ada situs web www.pelayanan.jakarta.go.id yang menyediakan informasi tentang kelengkapan persyaratan, mekanisme pelayanan, dasar hukum, dan biaya retribusi perizinan serta non-perizinan di DKI Jakarta.

Ada banyak informasi pribadi yang termuat dalam sistem daring ini. Karenanya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memastikan keamanan infomasi dari masyarakat.





Online Public Services in the Province of DKI Jakarta

Related SDGs	GOOD HEALTH AND WELL-BEING	DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH	PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS	PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
Strengths	Public service system can be appropriately implemented during the pandemic. Reducing the risk of transmission within communities.			
Weaknesses				
Effectivity	Dependent upon the continuous maintenance and updating of information systems (permit and non-permit).			
Relevance	Relevant to all regions.			

An online service system had already been proposed by the Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta before the pandemic. During the pandemic, the system has become one of the steps in curbing COVID-19 transmission, especially with regards to preventing crowds in public service facilities. The online service system has proven to be rather effective during the pandemic, with the Province of DKI Jakarta's Mall for Public Services having served 5,032 applicants from June 15-26, 2020.

Several online public services have been implemented in DKI Jakarta. Jakevo is accessible through its website or a smartphone application and is used to process applications for permits and non-permits in DKI Jakarta. AJIB (Antar Jemput Izin

Bermotor) is a smartphone application that provides delivery services for business permit documents. Call centre Tanya PTSP 1500164 is an online service from the Investment Agency (DPM) and the Integrated One-Door Service (PTSP).

There is also the website www.pelayanan.jakarta.go.id, which provides information on application requirements, service procedures, legal base, and permit and non-permit retribution fees in DKI Jakarta.

A wealth of private information is stored in this online system, which is why the provincial government of DKI Jakarta are working together with the National Cyber and Crypto Agency (BSSN) to guarantee the security of the information from the public.





LAYANAN DESK KONSELING BAGI WARGA (PEREMPUAN DAN ANAK) DI PROVINSI JAWA TIMUR

TPB Terkait	KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	KESETARAAN GENDER	BERKURANGAN KESENJANGAN	KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN
Kelebihan	Memaksimalkan teknologi untuk pelayanan. Semakin banyak kasus yang melibatkan perempuan dapat tertangani.			
Kekurangan	Walaupun banyak kasus ditangani, penyelesaian kasus masih rendah karena menuntut proses penyelesaian langsung di lapangan.			
Efektivitas	Kerjasama pemerintah dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi profesi, dan organisasi kemanusiaan.			
Relevansi	Relevan bagi semua daerah.			

Kasus kekerasan berbasis gender meningkat selama masa pandemi, baik di tingkat daerah maupun nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan melakukan beberapa langkah pencegahan dan penanganan berupa kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi profesi, dan lembaga/organisasi kemanusiaan.

Melalui kerja sama dengan Himpunan Psikologi (Himpsi), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), pemerintah membentuk Desk Konseling Paripurna untuk Keluarga Sejahtera (Desel Pangkas). Pelayanan ini tersebar di lima badan koordinasi wilayah di Provinsi Jawa Timur.

Desel Pangkas merupakan layanan masyarakat

untuk konsultasi tentang masalah sosial, seperti permasalahan keluarga hingga kekerasan pada anak dan perempuan akibat pandemi COVID-19. Beberapa bentuk layanan lain yang tersedia yaitu, pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, terapi stres anak pada pendidikan, dan sebagainya. Layanan berupa konseling, edukasi dan pendampingan diberikan secara daring (*online*) dan luring (*offline*).

Tindak lanjut bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan berbasis gender lainnya yang terindikasi dalam layanan Desel Pangkas maupun di luar itu akan diberikan dalam bentuk literasi dan pelatihan pemberdayaan. Layanan ini bekerja sama dengan rumah sakit dan kepolisian untuk pemulihhan korban. Kegiatan tersebut terlaksana melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Rumah Sakit dan Kepolisian (P2TPA Baru Pol).





COMMUNITY (WOMEN AND CHILDREN) COUNSELLING DESK SERVICE IN EAST JAVA PROVINCE

Related SDGs					
Strengths	Maximises technology for provision of services. More female-related cases are handled.				
Weaknesses	Despite an increase in the number of cases handled, the number of resolved cases is still low due to the need for on-site resolution.				
Effectivity	Partnership between government and NGOs, professional organisations, and humanitarian organisations.				
Relevance	Relevant to all regions.				

The number of gender-based violence has increased both regionally and nationally during the COVID-19 pandemic. To curb this dangerous trend, the Provincial Government of East Java – through the Office of Women Empowerment, Child Protection, and Population Control (DP3AK) – have employed several preventive and management measures.

The local government have moved to form the Community Counselling Desk for Family Welfare (Desel Pangkas) in cooperation with the Indonesian Psychological Association (Himpsi), the Teachers Association of the Republic of Indonesia (PGRI), the National Population and Family Planning Board (BKKBN), and the Women and Child Protection Regional Technical Executive Unit (UPTD PPA).

Desel Pangkas provide consultations for the public in social issues ranging from family problems to violence against children and women. Other services include the provision of information on family resilience and child psychology therapy. Desel Pangkas' counselling, education, and mentorship services are provided both online and offline.

To follow through Domestic Violence (KDRT) and gender-based violence cases, Desel Pangkas have been working closely with hospitals and the local police to ensure victims' recovery.

The DP3AK have also implemented a preventive measure by disseminating information on family resilience to the general public through podcasts, a smartphone game application, and family-themed stories.





Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat

JOGO TONGGO DI PROVINSI JAWA TENGAH

TPB Terkait	    
Kelebihan	Memberdayakan partisipasi seluruh elemen masyarakat.
Kekurangan	Mengalihkan beban penanganan dari pemerintah ke masyarakat. Belum optimalnya penerapan teknologi informasi.
Efektivitas	Solidaritas masyarakat dan kepemimpinan lokal.
Relevansi	Relevan bagi semua daerah, khususnya dengan tingkat kasus positif yang tinggi.

Guna melengkapi tindakan, pemerintah mengambil langkah preventif berupa penyiaran informasi kepada masyarakat melalui *dashboard* informasi, *podcast*, konten permainan, penghilang stigma, variasi cerita dan aktivitas belajar lainnya.

Program Jogo Tonggo digalakkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama pandemi dengan melibatkan masyarakat secara luas. Program ini bertujuan mengidentifikasi kelompok rentan, memantau pergerakan masyarakat, dan menangani kasus suspek atau positif COVID-19.

Program ini dituangkan dalam Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 dan diwujudkan dengan dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Jogo Tonggo, yang memberdayakan warga hingga di level Rukun Warga (RW).

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberi bekal dasar untuk setiap satgas berupa sarung tangan, masker, disinfektan, modul, dan Alat Pelindung Diri (APD).

Personel Satgas Jogo Tonggo ini terdiri dari anggota karang taruna, anggota dasa wisma, para bidan desa, petugas posyandu, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, dan organisasi lainnya. Ketua RW berperan sebagai koordinator satgas.

Program Jogo Tonggo juga disesuaikan dengan situasi setempat, misalnya dengan program Jogo Santri di kawasan pesantren dan Jogo Plesiran di kawasan pariwisata yang telah dibuka kembali.





Community Empowerment and Participation

JOGO TONGGO IN CENTRAL JAVA PROVINCE

Related SDGs	1 NO POVERTY	3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING	5 GENDER EQUALITY	16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS	17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
Strengths	Empowering the participation of all elements of society.				
Weaknesses	Diverting management burden from the government to the community. Inadequate implementation of information technology.				
Effectivity	Community solidarity and regional leadership.				
Relevance	Relevant to all regions, especially those with higher rates of positive cases.				

The Jogo Tonggo programme was encouraged by the Provincial Government of Central Java during the pandemic by involving the general public. The objectives of this programme include identifying vulnerable groups, monitoring people's movements, and handling suspected or positive COVID-19 cases.

This programme was drafted in the Government Instruction No. 1 Year 2020 and realised with the formation of the Jogo Tonggo Task Force (Satgas), which empowered the public up to the Community Unit (RW). Essential equipment for every Task Force, including gloves, face masks, disinfectants, modules, and Personal Protective Equipment (APD), were provided by the Provincial Government of Central Java.

The personnel in the Jogo Tonggo Task Force comprised members of the Youth Organisation (Karang Taruna), members of the local women's group (Dasa Wisma), local midwives, integrated health centre (*posyandu*) officials, Program Keluarga Harapan (PKH) mentors, Agricultural Extension Field (PPL) members, religious leaders, prominent locals, and other organisations. The RW leader would take the role of the Task Force coordinator.

The Jogo Tonggo programme can also be adapted to the situation in a particular area, such as the Jogo Santri programme in Islamic boarding schools and Jogo Plesiran in reopened tourist sites.





UNIT DETEKSI AKTIF DAN UNIT EDUKASI DI KOTA BOGOR

TPB Terkait					
Kelebihan	Memberdayakan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Memadukan unsur pencegahan dan edukasi.				
Kekurangan	Mengalihkan beban penanganan dari pemerintah ke masyarakat. Belum optimalnya penerapan teknologi informasi.				
Efektivitas	Kepemimpinan lokal. Kedisiplinan warga secara luas, termasuk para pelaku usaha. Tindak lanjut pasca deteksi, pemantauan, dan edukasi.				
Relevansi	Relevan bagi semua daerah, khususnya daerah dengan jumlah kasus positif yang tinggi.				

Pemerintah Kota Bogor merusaha menekan kasus COVID-19 di wilayahnya dan mengurangi dampak pandemi ini dengan cara bekerja sama dengan masyarakat. Ada dua unit yang dibentuk dengan cara ini, yaitu Unit Deteksi Aktif dan Unit Edukasi.

Unit Deteksi Aktif (Detektif) terdiri dari tim pelacak dan tim pemantau. Tim pelacak berada di tingkat kecamatan dan kelurahan. Tugasnya adalah melacak kontak kasus positif, menilai kemampuan isolasi mandiri, memfasilitasi rumah isolasi, dan memfasilitasi rujukan ke rumah sakit rujukan. Sementara itu, tim pemantau yang terdiri dari petugas puskesmas, bergerak di tingkat RW. Tugasnya adalah memantau pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri, baik di rumah sendiri atau di fasilitas yang disediakan kelurahan.

Unit Edukasi juga terdiri dari dua tim, yaitu Merpati dan Elang. Tim Merpati bertugas memberi edukasi, menyusun strategi, dan menyebarluaskan protokol kesehatan kepada masyarakat. Tim ini beranggotakan tenaga kesehatan, tokoh agama, relawan, komunitas penyintas COVID-19 (Temanco), dan gugus tugas nasional.

Sementara itu, Tim Elang bertugas mengawasi pelaku usaha dan memastikan mereka mematuhi protokol kesehatan. Anggota tim ini berasal dari karang taruna, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Bogor, dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bogor. Mereka bekerja sama dengan TNI, Polri, dan Satpol PP untuk menindak pelaku usaha yang melanggar peraturan.





ACTIVE DETECTION UNIT AND EDUCATION UNIT IN THE CITY OF BOGOR

Related SDGs					
Strengths	Empowering the participation of all elements of society. Combining preventive measures and education.				
Weaknesses	Diverting management burden from the government to the community. Inadequate implementation of information technology.				
Effectivity	Local leadership. Requires discipline from the whole community, including businesses. Follow-up on post-detection, including monitoring and education.				
Relevance	Relevant to all regions, especially those with higher rates of positive cases.				

The City Government of Bogor tried to curb the number of COVID-19 cases in the area and lessen the impacts from the pandemic by working together with the general public. It involved the forming of two units: Active Detection Unit and Education Unit.

The Active Detection Unit (Detektif) consists of tracing and monitoring teams. The tracing team is placed at the subdistrict and urban village levels and are tasked with positive cases contact tracing, evaluating self-isolation capability, facilitating isolation houses, and providing referrals to referred hospitals. The monitoring team comprises *puskesmas* officials and operate at the Community Unit (RW) level. They are tasked with monitoring COVID-19 patients who are undergoing self-isolation, be it at their own home or a facility provided by the urban village office.

The Education Unit also consists of two teams: Merpati and Elang. Merpati is tasked with providing education, develop strategies, and disseminating information on health protocols to communities. They contain healthcare professionals, religious leaders, volunteers, members of the Teman Lawan COVID-19 (Temanco) community, and national task force staff.

Meanwhile, Elang is assigned with monitoring businesses and ensuring that they comply with health protocols. The team consists of members of the Karang Taruna, the Indonesian Young Entrepreneurs Association (HIPMI) of Bogor, and the Indonesian National Youth Committee (KNPI) of Bogor. The Elang team are cooperating with the TNI, the Indonesian National Police (Polri), and the Municipal Police (Satpol PP) to act on businesses that break protocols.



Pembukaan Kembali dan Pemulihan Kegiatan Ekonomi

PROSEDUR STANDAR KESEHATAN WISATA BERBASIS MASYARAKAT DI KOTA SAWAHLUNTO

TPB Terkait				
Kelebihan	Masyarakat bisa berwisata selama pandemi. Staf dan pengelola objek wisata bisa mempertahankan pekerjaan. Kesehatan wisatawan diprioritaskan, risiko penularan bisa dikurangi.			
Kekurangan	Daya tampung objek wisata berkurang.			
Efektivitas	Kedisiplinan pengelola objek wisata dan kesadaran wisatawan.			
Relevansi	Relevan bagi semua daerah (khususnya pada zona hijau) dan daerah dengan leading sector di bidang pariwisata.			

Dalam masa pandemi ini, Kota Sawahlunto mengalami pukulan besar di sektor andalan mereka, yaitu sektor pariwisata. Lokasi wisata ditutup untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Hal ini menyebabkan turunnya jumlah wisatawan, yang mempengaruhi perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah. Karena itu, Pemerintah Kota Sawahlunto berupaya memulihkan perekonomian dengan cara membuka kembali sektor pariwisata dan menerapkan protokol kesehatan.

Sebelum sektor pariwisata dibuka kembali, pemerintah kota mengedukasi pengelola objek wisata, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan masyarakat luas tentang pentingnya protokol kesehatan di lokasi wisata.

Lalu, para petugas diwajibkan tes PCR untuk COVID-19 sebelum pembukaan lokasi wisata. Fasilitas disiapkan untuk transaksi pembayaran secara digital di lokasi wisata, untuk menghindari kontak fisik. Jam operasional dan jumlah wisatawan juga dibatasi. Pihak TNI dan Polri dilibatkan untuk menindaklanjuti bila ada pelanggaran. Pembukaan objek wisata di Kota Sawahlunto ini juga dibarengi dengan pembukaan kembali hotel dan fasilitas pendukung lainnya.





Reopening and Recovering Economic Activities

HEALTH STANDARD PROCEDURES FOR COMMUNITY-BASED TOURISM IN THE CITY OF SAWAHLUNTO

Related SDGs	 1 NO POVERTY Icon: Three stylized human figures.	 3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING Icon: A heart with a pulse line.	 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH Icon: A bar chart with an upward arrow.	 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS Icon: Three overlapping circles.	
Strengths	People can travel safely during the pandemic. The staff and management of tourist attractions can keep their jobs. Prioritising the health of tourists, transmission risk reduced.				
Weaknesses	Reduction in capacity for tourist attractions.				
Effectivity	Compliance of tourist attractions' management to apply health protocols and awareness level of tourists on risks.				
Relevance	Relevant to all regions (especially green zones) and tourism-focused areas.				

During the pandemic, the city of Sawahlunto suffered a devastating blow to its most reliable sector: the tourism sector. Many tourist attractions have been temporarily closed down to prevent the spread of COVID-19. This has resulted in the number of tourist arrivals plummeting, which subsequently affected the local economy and regional revenue. To overcome this problem, the government of Sawahlunto have moved to reopen the tourism sector and implement health protocols to revive the city's economy.

Prior to the reopening, the city government had to educate the management of tourist attractions, Tourism Awareness Groups (Pokdarwis), and the general public regarding the importance of health protocols at tourist attractions.

All personnel were required to take COVID-19 PCR test before the reopening. Facilities to support digital transactions were also provided at tourist attractions to avoid physical contact. Operational hours and the number of visitors were also reduced. The TNI and the Indonesian National Police were also involved in the reopening in case of any protocol breaches. The reopening of tourist attractions was conducted at the same time as the reopening of hotels and other supporting facilities of the tourism sector.





JOGJA PASS DAN VISITING JOGJA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)

TPB Terkait	 1 TANPA KEMISKINAN	 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	
Kelebihan	Masyarakat bisa berwisata selama pandemi. Kesehatan wisatawan diprioritaskan, risiko penularan bisa dikurangi. Mempermudah pengendalian keramaian di objek wisata.				
Kekurangan	Partisipasi dari objek wisata.				
Efektivitas	Kedisiplinan pengelola objek wisata dan kesadaran wisatawan.				
Relevansi	Relevan bagi semua daerah dengan leading sector di bidang pariwisata.				

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah salah satu daerah tujuan utama wisata di Indonesia. Setelah masa kedaruratan COVID-19 selesai, sebagian objek wisata di provinsi ini pun telah dibuka kembali. Pada Agustus 2020, tercatat lebih dari 4.000 orang berkunjung ke kawasan wisata di DIY.

Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di daerahnya, Pemerintah Provinsi DIY menggunakan dua aplikasi, yaitu Jogja Pass dan Visiting Jogja. Jogja Pass berfungsi sebagai *self-screening* COVID-19 sekaligus menyediakan data status kesehatan wisatawan di DIY. Aplikasi ini juga menyediakan informasi seperti nomor darurat, peta persebaran keramaian, dan kebijakan pemerintah tentang COVID-19.

Sementara itu, Visiting Jogja adalah aplikasi yang memudahkan pemerintah daerah untuk memantau wisatawan dan mengendalikan kerumunan di lokasi wisata. Bagi wisatawan, aplikasi ini bisa dipakai untuk reservasi tiket secara daring. Aplikasi ini juga menyediakan informasi tentang peta wisata, akomodasi, dan kuliner di DIY.





JOGJA PASS AND VISITING JOGJA PROGRAMME IN THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA (DIY/DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

Related SDGs	1 NO POVERTY	3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING	8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH	17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS	
Strengths	People can travel safely during the pandemic. Prioritising the health of tourists to minimise the risk of transmission. Making it easier to control crowds at tourist attractions.				
Weaknesses	Participation of tourist attractions.				
Effectivity	Compliance of tourist attractions' management to apply health protocols and awareness level of tourists on risks.				
Relevance	Relevant to all regions (especially green zones) and tourism-focused areas.				

The Special Region of Yogyakarta Province

is one of the main tourist destinations in Indonesia. Once the emergency period of COVID-19 came to an end, some of the tourist attractions in the province were reopened. In August 2020, more than 4,000 people have visited tourist areas in the province.

To anticipate the spread of COVID-19 in the area, the Provincial Government unveiled two smartphone applications: Jogja Pass and Visiting Jogja. The former functioned as a self-screening for COVID-19 and also provided data on tourists' health condition in the province. This application also provides information such as emergency numbers, a heat map on crowds, and government policies regarding COVID-19.

The Visiting Jogja application is used to assist local authorities in the monitoring and controlling of crowds at tourist attractions. For tourists, this app can be used to reserve tickets online and also provides information on the tourism map, accommodation, and the province's culinary world.



MODERNISASI PASAR RAKYAT DI KOTA SEMARANG DAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

TPB Terkait	    
Kelebihan	Memenuhi kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat selama pandemi. Pedagang bisa berjualan secara daring. Mengurangi kontak langsung ketika bertransaksi. Mencakup edukasi bagi para pedagang pasar. Bisa terus diterapkan pasca pandemi.
Kekurangan	Daya tampung pasar berkurang. Pengurangan jam kerja dan produktivitas. Memerlukan pengawasan ketat.
Efektivitas	Kedisiplinan pengelola pasar. Kesadaran pedagang dan pembeli.
Relevansi	Relevan bagi semua daerah (khususnya zona non-hijau) dan daerah perkotaan di mana budaya belanja daring sudah berkembang.

Selama pandemi, jumlah pengunjung pasar rakyat semakin berkurang. Hal ini mempengaruhi omzet penjualan para pedagang. Pemerintah Kota Semarang, melalui Dinas Perdagangan Kota Semarang, menyiasati hal ini dengan memanfaatkan fasilitas belanja daring (*online*). Mereka bekerja sama dengan Tumbasin.id untuk program yang berjalan sejak Januari 2020 ini. Masyarakat bisa memesan berbagai kebutuhan harian melalui aplikasi di telepon seluler mereka. Pesanan diterima oleh pedagang pasar dan dikirim ke pembeli dengan kurir.

Manfaat program daring ini makin terasa ketika memasuki masa pandemi, karena pedagang tetap mendapat pemasukan meski pengunjung pasar berkurang. Pengunjung

pun bisa memenuhi kebutuhan harian tanpa harus meninggalkan rumah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan inovasi serupa, dengan aplikasi telepon seluler bernama Baruga Pasar. Aplikasi ini dikembangkan oleh Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya, bekerja sama dengan penyedia aplikasi telepon seluler Gojek dan Grab. Sistemnya serupa dengan pasar daring di Semarang, yang memungkinkan masyarakat membeli kebutuhan dari pasar tanpa meninggalkan rumah.

Inovasi yang dilakukan di Kota Semarang dan Provinsi Sulawesi Selatan ini adalah program yang telah disiapkan sebelum pandemi berlangsung, dan terbukti sangat berguna selama masa pandemi.



MODERNISATION OF TRADITIONAL MARKETS IN THE CITY OF SEMARANG AND SOUTH SULAWESI PROVINCE

Related SDGs	    
Strengths	Fulfil the people's need for foodstuff during the pandemic. Merchants can sell their products online. Reduce direct contact during transactions. Education for market traders. Can continue to be applied post-pandemic.
Weaknesses	Reduced market capacity. Reduced working hours and productivity. Requires close monitoring.
Effectivity	Compliance from market management. Awareness of both traders and customers.
Relevance	Relevant to all regions (especially non-green zones) and cities with an online shopping culture.

The number of traditional market visitors

continued to dwindle during the pandemic, which has affected the income of market traders. Via the Trade Office of Semarang, the city's government attempted to overcome this issue by utilising online shopping facilities. They worked together with Tumbasin.id on a programme that has been running since January 2020, where the public could order their daily needs through a smartphone app. Their requests are directly received by market traders and delivered to customers by couriers.

The benefits from this online programme became more significant during the pandemic, as traders were able to generate revenue despite the decrease in market visitors. This also meant that customers could still fulfil their daily needs without having to leave their respective homes.

The Provincial Government of South Sulawesi have also implemented a similar innovative solution with a smartphone app called Baruga Pasar. Developed by the Regional Market Company (Perusahaan Daerah Pasar) of Makassar Raya – in cooperation with online transportation app developers Gojek and Grab – it presents a system akin to the online service in Semarang, which enables the general public to purchase items from the market without having to step foot outside their house.

The innovative breakthroughs implemented by the city of Semarang and the province of South Sulawesi are actually programmes that were already prepared prior to the pandemic, and they have proven to be exceptionally invaluable during the pandemic.





KOTAK 2: PENGALAMAN SERUPA DI KOTA GENT, BELGIA.

Situs Online untuk UKM dan Ritel: Pandemi COVID-19 memberi pukulan telak bagi para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di berbagai daerah di dunia. Di Kota Gent, Belgia, pemerintah setempat memunculkan solusi berupa situs web www.kooploka.gent yang mengakomodasi aktivitas ritel dan UKM secara daring. Situs ini berfungsi sebagai perantara antara pembeli dengan UKM di Kota Gent. Para pengusaha bisa menampilkan berbagai produk mereka, seperti produk makanan, cendera mata, dll.

Untuk program Kooploka ini, Pemerintah Kota Gent menggunakan data pelaku UKM dari sebuah organisasi UKM lokal bernama PuurGent. Produk yang terdaftar kemudian diiklankan di media sosial dan ditampilkan di situs web Kooploka. Para pelaku UKM juga bisa mendaftarkan usaha mereka secara mandiri dengan mengisi formulir dari pemerintah kota.

Situs web ini bertujuan membantu UKM sekaligus memicu perputaran ekonomi di kota Gent. Situs web Kooploka juga bisa digunakan setelah masa pandemi berakhir, untuk mendukung perkembangan UKM di tingkat lokal.

Kelebihan: Memaksimalkan teknologi untuk mengembangkan UKM dan ritel; situs mampu digunakan secara berkelanjutan. **Kekurangan:** Perlunya jaringan SDM yang memadai. **Efektivitas:** Pembaruan data usaha dan peningkatan promosi. **Relevansi:** Relevan bagi semua daerah. **TPB Terkait:** 3, 8, 9, 17.



BOX 2: SIMILAR EXPERIENCE IN GENT, BELGIUM.

Online Website for SMEs and Retailers: The COVID-19 pandemic has dealt a massive blow to SMEs worldwide. In Gent, Belgium, the local government developed a solution in the form of www.kooploka.gent, which accommodates retail and SME activities online. The website functions as an intermediary between buyers and SMEs in Gent, whereby businesses can showcase their products, including food, souvenirs, and many others.

The City Council of Gent utilised data of SMEs from a local SME organisation called PuurGent for this programme. Registered products would then be advertised on social media and displayed on Kooplaka's website. SMEs are also able to register their businesses on their own by filling out a form from the City Council.

The purpose of this website is to help SMEs and stimulate the circulation of the economy in Gent. Kooplaka could still be utilised after the pandemic to support the development of SMEs at the local level.

Strengths: Maximises technology to develop SMEs and retailers, website can still be used in the long run. **Weaknesses:** Requires qualified human resources. **Effectivity:** Updated data on businesses and improved promotion. **Relevance:** Relevant to all regions. **Related SDGs:** 3, 8, 9, 17.

Pengembangan Sistem Informasi dan Kolaborasi

SISTEM INFORMASI UNTUK URUN DANA (*CROWDFUNDING*) DI KOTA BOGOR

TPB Terkait	1 TANPA KEMISKINAN 	5 KESETARAAN GENDER 	10 BERKURANGNYA KESENJANGAN 	16 PERDAMAIAN, KEADILAN, DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH 	17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN 
Kelebihan	Sistem informasi ini memperkuat kelembagaan pemerintah daerah. Pemberdayaan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Memudahkan akses bantuan bagi yang membutuhkan; terbukanya informasi kebutuhan bantuan bagi para donatur.				
Kekurangan					
Efektivitas	Solidaritas masyarakat dan kepemimpinan lokal. Mempertemukan penerima bantuan dan donatur.				
Relevansi	Relevan bagi semua daerah.				

Bantuan sosial adalah salah satu program penting di masa pandemi ini, terutama bagi masyarakat rentan dan terdampak. Sayangnya, di beberapa daerah, masih ada banyak warga yang belum terdaftar di basis data pemerintah.

Di Kota Bogor, misalnya. Data pemerintah daerah menunjukkan bahwa dari 230 ribu Kepala Keluarga (KK) di Kota Bogor, hanya 71.111 KK yang terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai penerima Program Perlindungan Sosial dari Kementerian Sosial. Sementara itu, 90.379 KK masuk dalam kategori non-DTKS atau miskin baru terdampak COVID-19 yang perlu dibantu.

Pemerintah Kota Bogor menangani masalah ini dengan membentuk sistem informasi untuk urun dana (*crowdfunding*). Sistem informasi yang bisa diakses melalui situs web ini bernama Program Jaringan Keluarga Asuh Kota Bogor. Tujuan programnya adalah membantu masyarakat yang kehilangan penghasilan selama masa pandemi, namun tidak terdaftar sebagai penerima bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, ataupun Pemerintah Kota Bogor sendiri.

Program Jaringan Keluarga Asuh Kota Bogor menghubungkan pihak donatur dan penerima bantuan. Caranya, donatur mendaftarkan diri di situs web Jagaasa (www.jagaasa.kotabogor.go.id). Setelah itu, mereka resmi terdaftar





Information System Development and Collaboration

INFORMATION SYSTEM FOR CROWDFUNDING IN THE CITY OF BOGOR

Related SDGs	1 NO POVERTY	5 GENDER EQUALITY	10 REDUCED INEQUALITIES	16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS	17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
Strengths	Information system able to reinforce institutional aspect of local governments. Empowering the participation of all elements of society. Better access to aid for people in need, transparent information on donation needs for donors.				
Weaknesses					
Effectivity	Community solidarity and local leadership. Connecting donation recipients and donors.				
Relevance	Relevant to all regions.				

Social aid is one of the most crucial programmes during the pandemic, especially for vulnerable and affected communities. Unfortunately, there are still many citizens in several regions that have not been registered to receive these aids in the government's database.

In the city of Bogor, for example, data from the local government show that out of 230,000 households, only 71,111 are registered in the Integrated Social Welfare Data (DKTS) as recipients of the Ministry of Social Affairs' Social Protection Programme. Meanwhile, 90,379 households are categorised under non-DKTS or impoverished have been affected by COVID-19 and also require assistance.

The local government of Bogor have taken measures to overcome this issue by developing an information system for crowdfunding. This information system can be accessed through a website called the Bogor City Foster Family Network Programme (Jaringan Keluarga Asuh Kota Bogor). The objective of this programme is to aid people who have had no income during the pandemic and are not registered as aid recipients from the central government, provincial government, and the local government of Bogor.

The Bogor City Foster Family Network Programme connects donors and recipients. Donors are first required to sign up on the Jagaasa website (www.jagaasa.kotabogor.go.id) to be officially registered as foster





sebagai orang tua asuh dan bisa memilih wilayah serta keluarga penerima bantuan. Nilai bantuan minimal yang ditetapkan Pemerintah Kota Bogor bagi para donatur adalah Rp1.000.000. Bantuan ini disalurkan selama dua bulan pada penerima bantuan, dengan nominal Rp500.000 setiap bulannya.

Sementara itu, calon penerima bantuan bisa mendaftarkan diri di situs web Sistem Kolaborasi dan Solidaritas untuk Rakyat atau SALUR (www.salur.kotabogor.go.id). Setelah terdaftar di situs ini, petugas kecamatan dan kelurahan akan memverifikasi calon penerima bantuan.

KOTAK 3: PENGALAMAN SERUPA DI KOTA MILAN, ITALIA.

Kerja sama Pemerintah Kota dengan EMERGENCY: Selama masa pandemi ini, lansia dan warga yang memiliki kebutuhan khusus menjadi kelompok masyarakat yang rentan terdampak COVID-19. Untuk menanggapi hal itu, Pemerintah Kota Milan bekerja sama dengan EMERGENCY, sebuah lembaga kemanusiaan internasional.

Pemerintah kota dan EMERGENCY menyediakan layanan pengiriman barang (makanan dan obat-obatan) bagi lansia dan masyarakat yang dianjurkan karantina mandiri. Layanan ini juga melibatkan 150 relawan dari EMERGENCY dan People's Solidarity Brigades, yang telah menerima pelatihan tentang prosedur keamanan untuk layanan kesehatan.

Masyarakat yang membutuhkan pelayanan ini bisa menghubungi Pemerintah Kota Milan atau pihak EMERGENCY. Di lain pihak, masyarakat yang ingin menjadi donatur juga bisa berkontribusi lewat situs web EMERGENCY. Program ini bisa berjalan dengan efektif karena ada kerja sama yang baik antara pemerintah kota, lembaga kemanusiaan, dan relawan.

Kelebihan: Memberdayakan partisipasi masyarakat; memudahkan akses bantuan bagi warga lansia dan warga lain yang membutuhkan; terbukanya informasi kebutuhan bantuan bagi para donatur. **Efektivitas:** Kerja sama lembaga dan pemerintah kota. **Relevansi:** Relevan bagi semua daerah.

TPB Terkait: 3, 5, 10, 16, 17.



parents. They will then choose the area and family to receive donations. The minimum amount for donations that has been determined by Bogor's local government for donors is Rp. 1,000,000. It will then be funnelled to donation recipients within two months for Rp. 500,000 per month.

Recipient candidates can register themselves on the Collaboration and Solidarity System for the Community's (SALUR) website (www.salur.kotabogor.go.id). After registration, their data will then be verified by subdistrict and urban village officials.

BOX 3: SIMILAR EXPERIENCE IN MILAN, ITALY.

Local Government Partnership with EMERGENCY: The elderly and the disabled have become the most vulnerable groups of society at risk of being affected by COVID-19 during the pandemic. As a response to this pressing matter, Milan's City Council have forged a partnership with international humanitarian institution EMERGENCY.

The City Council and EMERGENCY teamed up to provide a courier service for food and medications catering to the elderly and those who have been advised to self-isolate. This service has involved 150 volunteers from EMERGENCY and the People's Solitary Brigades who have been trained on safety procedures for healthcare services.

Communities who required this service were able to contact the City Council of Milan or EMERGENCY. People who wished to become donors could contribute through EMERGENCY's website. This programme ran effectively due to the close working relationship between the city council, a humanitarian organisation, and volunteers.

Strengths: Empowering the participation of every element of society, better access to aid for the elderly and those in need, information transparency for donors. **Effectivity:** Cooperation between organisation and city government. **Relevance:** Relevant to all regions. **Related SDGs:** 3, 5, 10, 16, 17.



FORUM KOLABORASI JAKARTA

TPB Terkait	1 TANPA KEMISKINAN 	2 TANPA KELAPARAN 	4 PENDIDIKAN BERKUALITAS 	16 PERDAMAIAN, KEADILAN, DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH 	17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN 
Kelebihan	Forum bisa diarahkan secara fleksibel. Memperkuat kelembagaan pemerintah daerah. Pemberdayaan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Memudahkan akses bantuan bagi yang membutuhkan; terbukanya informasi kebutuhan bantuan bagi para donatur. Upaya perluasan cakupan kegiatan dengan melakukan pameran dagang (expo).				
Kekurangan					
Efektivitas	Solidaritas masyarakat dan kepemimpinan lokal. Mempertemukan penerima bantuan dan donatur. Tersedianya tim penjemput dan pengumpul (aggregator) bantuan				
Relevansi	Relevan bagi semua daerah.				

Jakarta yang mendeklarasikan diri sebagai “City of Collaboration” memberikan contoh bagaimana menggunakan kolaborasi untuk mengatasi dampak COVID-19, dengan mengusung konsep Jakarta Development Collaboration Network atau Forum Kolaborasi Jakarta.

Forum ini adalah unit ad-hoc yang dibina oleh Deputi Penduduk dan Permukiman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk mensinergikan semua kolaborasi yang ada di Jakarta. Forum ini awalnya dibangun pada awal 2020 untuk membangkitkan semangat pembangunan kota (*urban regeneration*) dengan target mengatasi masalah banjir, macet, sampah dan isu perkotaan lainnya. Sejak pandemi COVID-19, forum ini selanjutnya menggeser fokusnya menjadi penanganan dampak COVID-19.

Forum Kolaborasi Jakarta membuat aksi bernama Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB), untuk mengimbangi kegiatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Secara teknis, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat platform yang memudahkan warga Jakarta untuk saling membantu.

Aksi KSBB yang pertama bertepatan di bulan ramadan, ketika solidaritas warga dinilai berada pada tingkat tinggi, dan diarahkan untuk KSBB pangan. 141 kolaborator yang terlibat menghasilkan lebih dari 650 ribu paket bantuan pangan dan tunjangan hari raya. Platform ini didesain agar kolaborator bisa memilih target wilayah yang akan dibantu. Sebaliknya, penerima bantuan juga tahu siapa yang memberi bantuan. Dengan demikian tercipta hubungan sosio-emosional





JAKARTA DEVELOPMENT COLLABORATION NETWORK

Related SDGs	1 NO POVERTY 2 ZERO HUNGER 16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
Strengths	Flexibility of forum's direction. Bolstering regional institutions. Empowering the participation of all elements of society. Better access to aid for people in need, transparent information on donation needs for donors. Efforts to expand activity coverage by holding trade expo.
Weaknesses	
Effectivity	Community solidarity and local leadership. Connecting donation recipients and donors. Availability of donation pick-up and aggregator team.
Relevance	Relevant to all regions.

DKI Jakarta put forward the Jakarta Development Collaboration Network (Forum Kolaborasi Jakarta) concept to mitigate the impacts from the pandemic. It is an ad-hoc forum managed by the Deputy of Population and Settlement of the Provincial Government of DKI Jakarta to synergise all existing collaborations in Jakarta.

The Jakarta Development Collaboration Network was established in early 2020 as a means to stimulate urban regeneration and overcome issues such as floods, traffic congestions, waste management, and other urban challenges. Ever since the pandemic broke out, the Network have shifted their focus on managing the impacts from COVID-19 and introduced the Large-Scale Social Collaboration (KSBB).

Technically, the KSBB is a platform that enables people to help each other. The first KSBB was held in the holy month of Ramadan by providing food care packages to those in need. A total of 141 donors were involved in this activity, which generated more than 650,000 food care packages and Religious Holiday Allowance (THR). The KSBB allows donors to target areas to donate to. On the other hand, donation recipients can also obtain information on those who are helping them. It is hoped a socio-emotional bond can be developed between the two parties. The Provincial Government of DKI Jakarta have also made available pick-up and aggregator support teams.





di antara mereka. Hal ini juga menghindari tumpang tindihnya alokasi bantuan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyiapkan tim aggregator (penjemput dan pengumpul) bantuan bila bantuan tersebut tak cukup besar untuk disalurkan sendiri.

Aksi KSBB lainnya adalah kolaborasi sosial untuk UMKM, yang menghimpun bantuan berupa infrastruktur, pelatihan, dan modal usaha. Ada juga KSBB Pendidikan, yang menyediakan gawai bagi guru dan siswa yang kurang mampu. Sekitar 3000 gawai dan 10 ribu kartu prabayar telepon sudah didistribusikan hingga saat ini.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengadakan Jakarta Development

Collaboration Network (JDCN) Forum 2020 secara daring. Acara ini membahas berbagai topik untuk mendorong berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam proses pemulihan pandemi COVID-19. Acara ini melibatkan 42 pembicara, 52 organisasi, 12 moderator dari Indonesia dan 8 negara lainnya, serta disaksikan oleh 1.454.344 orang dari 38 negara.

Dalam forum tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebarkan informasi tentang berbagai kolaborasi sedang dilakukan, dengan harapan untuk memperbesar cakupan inisiatif ini. JDCN Forum juga bertujuan memberi ruang kolaborasi, sekaligus memberi apresiasi bagi para kolaborator yang konsisten berkolaborasi bahkan sebelum pandemi.



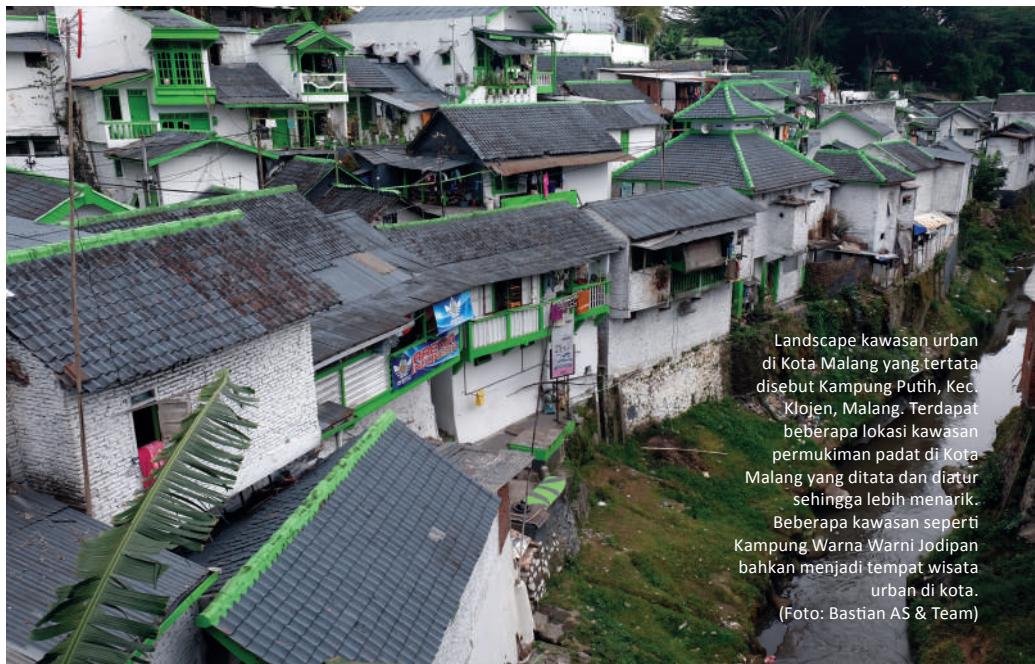


Other KSBB activities have included social collaborations for SMEs that collected aids in the form of infrastructure, training, and capital funds. The Network have also set-up KSBB Education, which provides gadgets for teachers and underprivileged students. More than 3,000 gadgets and 10,000 prepaid cards have been distributed up to this point.

The Provincial Government of DKI Jakarta also planned a Jakarta Development Collaboration Network Forum that was held from December 17-18, 2020. The objectives behind this forum include raising awareness about the Jakarta Development Collaboration Network and expanding the coverage of this initiative. The virtual forum would also provide opportunities for more collaborations,

new ideas, knowledge exchange, and showing appreciation to collaborators.

This effort has received much acclaim from various parties, including the Mayor of Berlin and the Mayor of Istanbul. As one of the pillars of SDGs, collaboration has proven to have a positive impact on facing COVID-19. Nearly all of the recent innovations and breakthroughs have been successfully realised due to effective collaborations, with every success story involving two or more collaborative institutions or organisations.





RADAR COVID-19 DI PROVINSI JAWA TIMUR

TPB Terkait	
Kelebihan	Sistem informasi memperkuat pemerintah daerah dalam melakukan intervensi penanganan COVID-19 Meningkatkan kesadaran kesehatan di tengah masyarakat.
Kekurangan	
Efektivitas	Tergantung pada pembaruan (update) data yang berkesinambungan pada sistem informasi.
Relevansi	Relevan bagi semua daerah, khususnya daerah dengan jumlah kasus positif COVID-19 yang tinggi.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya menekan jumlah kasus positif COVID-19 dengan memakai sistem informasi bernama Radar COVID-19. Tujuan sistem ini adalah memudahkan masyarakat mengakses informasi terbaru tentang COVID-19 sekaligus meningkatkan kewaspadaan masyarakat di masa pandemi. Radar COVID-19 adalah hasil kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Informasi yang disediakan dalam sistem ini berupa persebaran data anonim hingga level kelurahan untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pemantauan (PDP), kasus positif, dan pasien sembuh. Data lokasi kasus COVID-19 yang dimuat dalam sistem ini tidak berupa titik lokasi secara tepat, melainkan area radius 1 km berdasarkan alamat domisili kasus COVID-19. Datanya diperbarui setiap hari.

Radar COVID-19 bisa diakses masyarakat melalui nomor WhatsApp dan situs web ([HYPERLINK "http://www.radar covid-19.jatimprov.go.id"](http://www.radar covid-19.jatimprov.go.id) www.radar covid-19.jatimprov.go.id). Nomor WhatsApp Radar COVID-19 memiliki fitur chatbot yang menghubungkan masyarakat dengan relawan penanganan COVID-19. Sementara itu, situs webnya memuat data berupa peta persebaran kasus, keterangan pasien secara anonim (jenis kelamin, umur, dan status penanganan) dan ketersediaan kamar di rumah sakit rujukan.





COVID-19 RADAR IN EAST JAVA PROVINCE

Related SDGs	 3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING  16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS  17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS	
Strengths	Information system has empowered local governments in the intervention of COVID-19 management. Raising society's awareness on health issues.	
Weaknesses		
Effectivity	Dependent on continuously updated data in the information system.	
Relevance	Relevant to all regions, especially those with higher rates of positive cases.	

The Provincial Government of East Java have attempted to suppress the number of positive COVID-19 cases by utilising an information system called Radar COVID-19. The system's purpose is to provide better access for people to information regarding COVID-19 and raising their awareness.

Radar COVID-19 is the product of a cooperation between the East Java Provincial Government and the COVID-19 Management Acceleration Task Force. The information made available in the system include anonymous data on the transmission of the disease to the urban village level for People Under Observation (ODP), Patients Under Observation (PDP), positive cases, and recovered patients. The location data for COVID-19 cases in this system is not shown at its exact point but rather within a 1-kilometre

radius to the COVID-19 case home address. Its data are updated on a daily basis.

The public can access the Radar COVID-19 through a WhatsApp number and its website (www.radarcovid-19.jatimprov.go.id). The Radar COVID-19's WhatsApp number has a chatbot feature that connects the public with COVID-19 management volunteers. Its website contains data including a map of COVID-19 cases transmission, anonymous patient details (gender, age, and status), and room availability at referral hospitals.





KOTAK 4: PENGALAMAN SERUPA DI KOTA DAEGU, KOREA SELATAN.

3Ts (testing, Tracing, and Treating): Kota Daegu di Korea Selatan pernah disebut sebagai episentrum penyebaran COVID-19 di luar China. Pemerintah Kota Daegu bergerak cepat untuk menanggulangi masalah ini. Mereka menggunakan sistem yang terintegrasi untuk membuat situasi lebih stabil.

Pemerintah Kota Daegu melakukan tes COVID-19 secara massal kepada masyarakat. Mereka juga gencar melakukan pengawasan dan penelusuran (*surveillance and tracing*) untuk menemukan kasus COVID-19. Penelusuran ini dilakukan oleh satuan tugas, yang terdiri dari pejabat publik dan ahli epidemiologi, dengan memanfaatkan teknologi. Mereka menelusuri penggunaan kartu kredit, rekaman Closed-Circuit Television (CCTV) dan data Global Positioning System (GPS). Masyarakat yang dicurigai terpapar COVID-19 menerima pemberitahuan di telepon seluler mereka, dan diminta melakukan tes.

Pemerintah Kota Daegu melakukan pemeriksaan dengan cara *drive-through* dan *door-to-door*. Tes dengan metode *drive-through* bisa dilaksanakan dengan cepat sekaligus mengurangi kontak langsung antara petugas kesehatan dengan masyarakat. Selain itu, metode ini membantu mengurangi beban di fasilitas kesehatan, mudah diakses, dan melindungi privasi masyarakat. Dengan cara ini, pemerintah kota bisa mendapatkan hingga 100.000 sampel dan menguji 7.000 spesimen dalam satu hari.

Langkah selanjutnya adalah perawatan (*treating*) dengan cara menambah jumlah ranjang bagi pasien (bekerja sama dengan pihak swasta dan pemerintah provinsi lain) dan menambah fasilitas bagi pasien dengan gejala ringan (bekerja sama dengan pihak swasta seperti Samsung, LG, dan Hyundai). Beriringan dengan tindakan itu, Pemerintah Kota Daegu menambah jumlah petugas kesehatan dari luar Kota Daegu dan menyediakan *telemedicine*.

Masyarakat yang menjalankan isolasi mandiri mendapat fasilitas seperti pemeriksaan kesehatan, kebutuhan pokok, dan telepon seluler yang dilengkapi aplikasi perlindungan keamanan.

Pemerintah Kota Daegu berinisiatif mengampanyekan jaga jarak sebelum adanya kampanye di tingkat nasional dari pemerintah pusat. Informasi tentang COVID-19, hasil kebijakan dan arahan diberikan setiap hari. Pemerintah kota juga membentuk komite yang terdiri dari 204 perwakilan pemerintah dan masyarakat, dan melakukan pertemuan virtual secara rutin. Komite ini dibentuk untuk mengakomodir seluruh golongan dan aspek kehidupan masyarakat dalam kebijakan pemerintah kota.

Dengan langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kota Daegu berhasil menekan angka pasien dan meminimalisir dampak COVID-19 terhadap berbagai sektor pendukung kehidupan masyarakat tanpa melakukan *lockdown*.

Kelebihan: Menjamin akses pelayanan kesehatan masyarakat selama pandemi; membangun alternatif bagi infrastruktur kesehatan; membangun partisipasi dari seluruh kalangan masyarakat; mengurangi dampak negatif COVID-19. **Efektivitas:** Kerja sama berbagai pihak, baik swasta maupun masyarakat; komitmen dokter dan pengelola rumah sakit; respons cepat dari berbagai pihak. **Relevansi:** Relevan bagi semua daerah. **TPB Terkait:** 3, 5, 9, 16, 17.



BOX 4: SIMILAR EXPERIENCE IN DAEGU, SOUTH KOREA.

3Ts (Testing, Tracing, and Treating): the city of Daegu in South Korea was once reported as the epicentre of COVID-19 transmission outside of China. Daegu's Metropolitan City Government responded quickly to overcome this problem by using an integrated system to stabilise the situation.

The Metropolitan City Government of Daegu conducted mass COVID-19 tests and actively arranged surveillance and tracing to detect COVID-19 cases. Tracing was carried out by a task force comprising public officials and epidemiologists who utilised technology to assist them. They traced credit card history, Closed-Circuit Television (CCTV) recordings, and Global Positioning System (GPS) data. Suspected COVID-19 cases were informed via their smartphones and requested to take a test.

The city government carried out testings using drive-through and door-to-door methods. Drive-through tests were able to be conducted swiftly while minimising direct contact between health officials and the public. This method also reduced the burden on healthcare facilities, was more accessible, and protected people's privacy. The city government were able to collect up to 100,000 samples and tested 7,000 specimens in a day by using this method.

Treating was the next step in the process, and it involved increasing the number of beds for patients (in cooperation with the private sector and other provincial governments) and adding more facilities for patients with mild symptoms (in cooperation with private companies such as Samsung, LG, and Hyundai). At the same time, the Metropolitan City Government of Daegu increased the number of health officials from outside of Daegu and established a telemedicine system.

Facilities such as health checks, necessities, and smartphones with a pre-installed safety protection app were provided for those undergoing self-isolation.

The Metropolitan City Government of Daegu initiated a physical distancing campaign before the national and central governments mandated it. Information on COVID-19, new policies, and directives were broadcasted daily. The city government also formed a committee consisting of 204 government and community representatives who held routine virtual meetings. This committee was established to accommodate all layers and life aspects of society in city government policies.

By exercising these steps, the Metropolitan City Government of Daegu were able to curb the number of cases and minimise COVID-19 impacts on several sectors related to society's life support system without having to enforce a lockdown.

Strengths: Guaranteed access to healthcare services during the pandemic, development of alternative healthcare infrastructure, encourages participation of the general public, minimising negative impacts of COVID-19. **Effectivity:** Cooperation between various parties, including the private sector and communities, the commitment of doctors and hospital management, prompt response from various parties. **Relevance:** Relevant to all regions. **Related SDGs:** 3, 5, 9, 16, 17.

Penutup

Buku saku ini mendokumentasikan 14 jenis pengalaman inovatif di 7 kota/ kabupaten, dan 6 provinsi di Indonesia. Pengalaman berharga ini dikemas dalam enam tema utama inovasi dan terobosan yaitu yang terkait dengan: (i) bantuan dan perlindungan sosial, (ii) penerapan stimulus ekonomi, (iii) pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, (iv) pemeliharaan layanan dasar masyarakat, (v) pembukaan kembali dan pemulihan kegiatan ekonomi, dan (vi) pengembangan sistem informasi dan kolaborasi.

Meski berbagai inovasi dan terobosan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah ini memiliki keunggulannya masing-masing, tentu masih ada sejumlah kekurangan yang penting dicatat sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan. Secara umum, keduanya membentuk pola keseimbangan baru (*trade-off*). Misalnya, program yang berpihak pada satu kelompok rentan dan terdampak, ternyata memiliki konsekuensi berupa turunnya pendapatan daerah. Sebagai contoh lainnya, inovasi untuk mempertahankan kegiatan ekonomi (seperti pasar, café, tempat hiburan), memiliki konsekuensi terkait kapasitas maksimal untuk kegiatan tersebut.

Meski begitu, kita harus menggarisbawahi bahwa berbagai inovasi dan terobosan yang dituangkan dalam buku ini memiliki manfaat besar bagi masyarakat di masa pandemi COVID-19. Kita harus sadar bahwa pola-pola lama *business as usual* sudah tidak bisa diterapkan begitu saja.

Setiap inovasi dan terobosan juga memiliki prasyarat dalam penerapannya. Ada 10 faktor

yang mempengaruhi efektivitas inovasi dan terobosan tersebut, yaitu

- Ketersediaan payung hukum;
- Sinergi program pusat dan daerah
- Kerja sama/kemitraan antar lembaga, institusi, badan usaha dan pemangku kepentingan lainnya
- Data dan pendataan
- Komitmen pemerintah daerah dan pelaksana kegiatan di lapangan
- Pembiayaan, operasi dan pemeliharaan infrastruktur jaringan pendukung
- Kedisiplinan dan kesadaran semua pihak yang terlibat
- Solidaritas dan partisipasi warga
- Kualitas kepemimpinan lokal, serta
- Penerapan sistem informasi dan teknologi.





Closing

This pocketbook documents 14 types of innovative experience in seven cities/regencies and six provinces in Indonesia. These valuable experiences are summarised into six main themes on innovations and breakthroughs that are related to (i) social aid and protection, (ii) economic stimulus implementation, (iii) society empowerment and participation, (iv) essential public service maintenance, (v) the reopening and recovery of economic activities, and (vi) information system development and collaboration.

Despite the strengths of each innovation and breakthrough that has been carried out by local governments, some limitations have to be observed for evaluation and improvement purposes. Generally, both have formed new trade-offs. For example, programmes that focused on vulnerable and affected groups have consequences such as a decrease in regional revenue. Another example would be innovative solutions to sustain economic activities (such as markets, cafes, and entertainment centres), which impacted the maximum capacity for these activities.

However, we must highlight the fact that

the various innovations and breakthroughs described in this book have significantly benefited society during the COVID-19 pandemic. We must be aware that the “business-as-usual” approaches of old could not be implemented as is.

There are prerequisites in the implementation of each innovation and breakthrough. Ten factors affect the effectiveness of these innovations and breakthroughs:

- Legal foundation
- Synergy between central and regional programmers
- Cooperations/partnerships between organisations, institutions, businesses, and other stakeholders
- Data and database,
- Commitment of regional governments and on-site implementers
- Supporting network infrastructure funding, operations, and maintenance
- Discipline and commitment of all parties involved
- Public participation and solidarity
- Local leadership quality, and
- Application of information system and technology.





Pada intinya, kita perlu memahami bahwa di balik kesuksesan inovasi dan terobosan seringkali ada faktor pendorong yang tidak terekspos. Oleh karena itu, pemerintah daerah bukan saja harus memilih strategi inovatif, tetapi juga berusaha menciptakan kondisi, atmosfer, dan ekosistem agar strategi tersebut bisa berjalan.

Walaupun dampak hasil dari inovasi ini belum semua dapat dianalisa secara detail di dalam Buku Saku ini, tetapi inovasi dan terobosan yang di lakukan oleh pemerintah daerah berhubungan erat dengan pelaksanaan target TPB di daerah masing-masing.



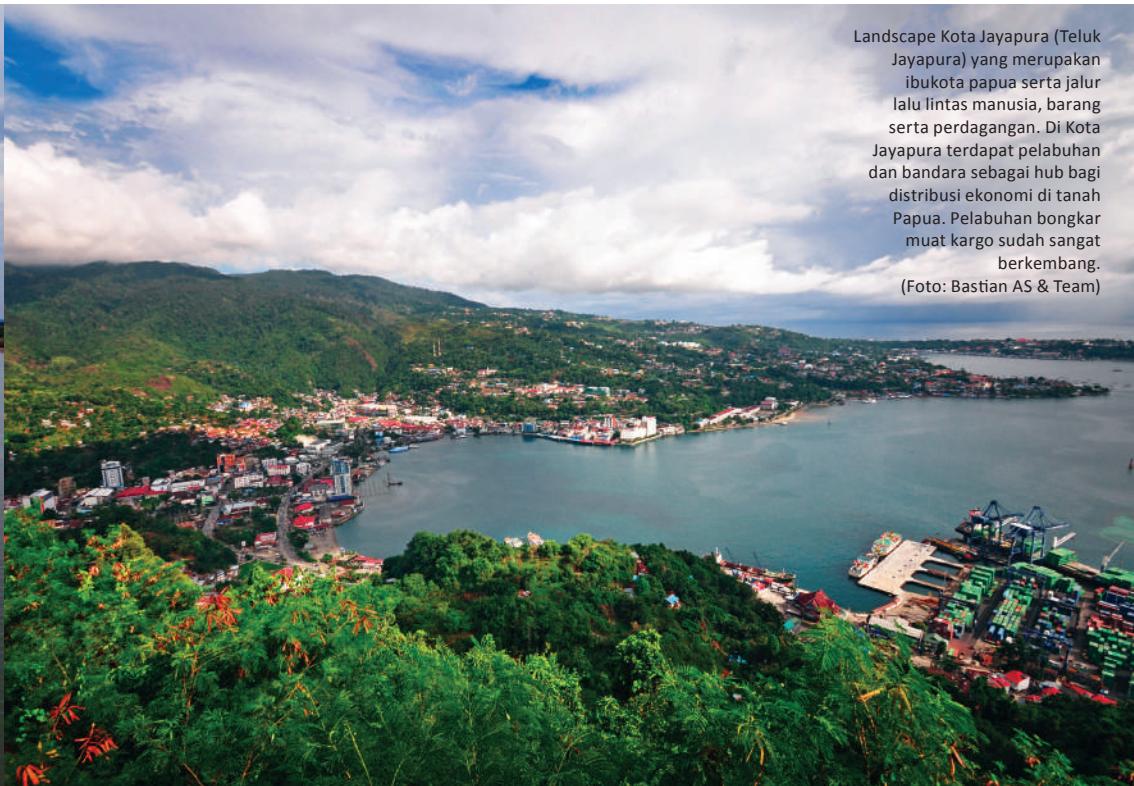
Keindahan Pantai Pasir
di Kota Pangkal Pinang,
Provinsi Bangka Belitung
di lihat dari Jembatan
Emas Pangkal Pinang.
(Foto: Bastian AS &
Team)





In essence, we have to understand that there are various hidden supporting factors behind every successful innovation and breakthrough during the pandemic. Hence, local governments must continue to create a conducive condition, atmosphere, and ecosystem for these innovative strategies to run effectively.

Although the impact of these innovations cannot be analysed in detail in this Pocketbook, the innovations and breakthroughs made by local governments are closely related to the implementation of SDG targets in their respective regions.



Landscape Kota Jayapura (Teluk Jayapura) yang merupakan ibukota papua serta jalur lalu lintas manusia, barang serta perdagangan. Di Kota Jayapura terdapat pelabuhan dan bandara sebagai hub bagi distribusi ekonomi di tanah Papua. Pelabuhan bongkar muat kargo sudah sangat berkembang.
(Foto: Bastian AS & Team)





Daftar Pustaka/ *References*

- Aditya, Nicholas Ryan. (2020). "DIY Punya Jogja Pass dan Visiting Jogja untuk Wisatawan, Apa Itu?". Retrieved from <https://travel.kompas.com/read/2020/07/17/101600927/diy-punya-jogja-pass-dan-visiting-jogja-untuk-wisatawan-apa-itu?page=all>
- Azhar, Rahmanf. (2020). "Pemkot Gandeng Kodim 0407 Persiapkan Ketahanan Pangan Antisipasi Krisis Pangan". Retrieved from <https://bengkuluekspress.com/pemkot-gandeng-kodim-0407-persiapkan-ketahanan-pangan-antisipasi-krisis-pangan/>
- BAPPENAS. (2020). Webinar "Komitmen Daerah dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Pasca Pandemi COVID-19" (12 June 2020). Jakarta: UCLG ASPAC & APEKSI, UCLG ASPAC
- Carotenuto, Giorgio. (2020). "This French City Transforms Public Land and Parks Into Huge Vegetable Gardens For Families In Need". Retrieved from <https://consciousnet.org/this-french-city-transforms-public-land-and-parks-into-huge-vegetable-gardens-for-families-in-need/>
- Dewi. (2020). "Pertama di Sumbar, Kota Pariaman Cairkan Bansos". Retrieved from <https://pariamankota.go.id/berita/pertama-di-sumbar-kota-pariaman-cairkan-bansos>
- Dimitrova, Aseniya. (2020). "Municipal Vegetable Gardens Help Struggling Families in Nantes 25 Tonnes of Locally Grown Fresh Vegetables Will Help 1000 Vulnerable Families Affected by The Covid-19 Crisis". Retrieved from <https://www.themayor.eu/en/municipal-vegetable-gardens-help-struggling-families-in-nantes>
- Diskominfo Kabupaten Trenggalek. (2020). "Antisipasi Dampak Sosial Ekonomi Dimasa Penanggulangan Covid-19, Pemkab Trenggalek Luncurkan 5000 Kartu Penyanga Ekonomi'". Retrieved from <https://www.trenggalekkab.go.id/berita.php?page=563>
- Diskominfo Provinsi Jawa Tengah. (2020). "Jogo Tonggo Masuk Top 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-19". Retrieved from <https://jatengprov.go.id/beritaopd/jogo-tonggo-masuk-top-21-inovasi-pelayanan-publik-penanganan-covid-19/>
- Efanurza. (2020). "Di Balik Pencairan Dana Bansos, Semua Tersalurkan, Bantuan Cair Jelang Lebaran". Retrieved from <https://posmetropadang.co.id/di-balik-pencairan-dana-bansos-semua-tersalurkan-bantuan-cair-jelang-lebaran/>



- Emergency. (2020). "A service delivering essential items to vulnerable people Italy-Milan". Retrieved from <https://en.emergency.it/projects/a-service-delivering-essential-items-to-vulnerable-people/>
- Folke, C. (2006). Resilience: The emergence of a perspective for social-ecological systems analyses. *Global Environmental Change*, 16(3), 253–267.
- Gamatechno. (2020). "Jogja Pass: Identitas Digital Masyarakat Jogja di Era Kebiasaan Baru". Retrieved from <https://www.gamatechno.com/news/jogja-pass-identitas-digital-masyarakat-jogja-di-era-kebiasaan-baru/>
- Gent. (2020). "New website for local retail in corona times". Retrieved from <https://stad.gent/en/city-policy/news-events/new-website-local-retail-corona-times>
- Habibi, Nugroho. (2020). "Pemkot Bogor Luncurkan Jaga Asa". Retrieved from <https://republika.co.id/berita/qagbto396/jaring-donatur-pemkot-bogor-luncurkan-jaga-as>
- Lee, Sang M and Don Hee Lee. (2020). Lessons Learned from Battling COVID-19: The Korean Experience. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. <https://doi.org/10.3390/ijerph17207548>
- Mursito, Iyud. (2020). "Kapolda Bengkulu Resmikan Kampung Berseri, Perkuat Ketahanan Pangan Masyarakat dalam Bengkulu Ekspress Seputar Kota". Retrieved from <https://bengkuluekspress.com/kapolda-bengkulu-resmikan-kampung-berseri-perkuat-ketahanan-pangan-masyarakat/>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). "OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19) Cities policy responses". Retrieved from <https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/cities-policy-responses-fd1053ff/>
- Pemerintah Kota Bengkulu. (2020). Webinar LOCALISE SDGs "Komitmen Daerah dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Pasca Pandemi COVID-19" (12 June 2020). Jakarta: UCLG ASPAC & APEKSI
- Pemerintah Kota Bogor. (2020). "Jaringan Keluarga Asuh Kota Bogor". Retrieved from <http://jagaasa.kotabogor.go.id/bG9naW4=.do>





- Pemerintah Kota Gorontalo (2020). (2020). Webinar “Komitmen Daerah dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Pasca Pandemi COVID-19” (12 June 2020). Jakarta: UCLG ASPAC & APEKSI
- Pemerintah Kota Jambi. (2020). Diskusi Daring LOCALISE SDGs TPB dan COVID-19 “Mendorong Pemerintah Daerah Memanfaatkan Teknologi Telemedicine dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19” (2 September 2020). Jakarta: UCLG ASPAC & APEKSI
- Pemerintah Kota Jambi. (2020). Webinar “APEKSI-UNESCO Jakarta: International Disabilities Inclusion Webinar” (17 July 2020). Jakarta: APEKSI-UNESCO
- Pemerintah Kota Jogja. (2020). Webinar “APEKSI-UNESCO Jakarta: International Disabilities Inclusion Webinar” (17 July 2020). Jakarta: APEKSI-UNESCO
- Pemerintah Kota Palangkaraya. (2020). Webinar LOCALISE SDGs “Strategi Dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pencapaian Sasaran Jangka Pendek Dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB Di Masa Pandemi COVID-19” (25 June 2020). Jakarta: UCLG ASPAC & APEKSI
- Pemerintah Kota Pariaman. (2020). Webinar LOCALISE SDGs “Strategi Dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pencapaian Sasaran Jangka Pendek Dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB Di Masa Pandemi COVID-19” (25 June 2020). Jakarta: UCLG ASPAC & APEKSI.
- Pemerintah Kota Sawahlunto. (2020). Diskusi Daring LOCALISE SDGs “Strategi dan upaya pemerintah daerah dalam pemulihan industri pariwisata menuju adaptasi kebiasaan baru selama masa pandemi COVID-19” (6 August 2020). Jakarta: UCLG ASPAC & APEKSI., 6 Agustus 2020
- Pemerintah Kota Semarang. (2020). Webinar LOCALISE SDGs “Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui Modernisasi Pengelolaan Pasar Tradisional” (17 September 2020). Jakarta: UCLG ASPAC & APEKSI
- Pemerintah Kota Tangerang. (2020). Diskusi Daring LOCALISE SDGs TPB dan COVID-19 “Upaya Pemerintah Daerah dalam Penegakan Disiplin Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19” (19 August 2020). Jakarta: UCLG ASPAC & APEKSI
- Pemerintah Kota Tegal. (2020). Diskusi Daring LOCALISE SDGs TPB dan COVID-19 “Upaya Pemerintah Daerah dalam Penegakan Disiplin Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19” (19 August 2020). Jakarta: UCLG ASPAC & APEKSI
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2020). Webinar “UNDIP SDG’s Series 2020 (Serie 3: 12th SDGs Responsible Consumption and Production)” (29 May 2020). Semarang: UNDIP.





- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2020). Webinar “UNDIP SDG’s Series 2020 (Serie _1: 3rd SDGs Health and Well Beings)” (29 April 2020). Semarang: UNDIP
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (2020). Diskusi Daring LOCALISE SDGs TPB dan COVID-19 “Upaya Pemerintah Daerah dalam Penegakan Disiplin Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19”, UCLG ASPAC & APEKSI, Jakarta, 19 Agustus 2020” (19 August 2020). Jakarta: UCLG ASPAC & APEKSI
- Pemerintah Provinsi Maluku. (2020). Diskusi Daring LOCALISE SDGs TPB dan COVID-19 “Mendorong Pemerintah Daerah Memanfaatkan Teknologi Telemedicine dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19” (2 September 2020). Jakarta: UCLG ASPAC & APEKSI
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. (2020). Webinar LOCALISE SDGs “Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui Modernisasi Pengelolaan Pasar Tradisional” (17 September 2020). Jakarta: UCLG ASPAC & APEKSI
- Radi. (2020). “Antisipasi Ketahanan Pangan, Pemkot Bengkulu Jalin Kerjasama dengan Kodim 0407”. Retrieved from <https://mediacenter.bengkulukota.go.id/antisipasi-ketahanan-pangan-pemkot-bengkulu-jalin-kerjasama-dengan-kodim-0407/>
- Republic of Korea. (2020). Daegu: The path nobody taught us International Affairs & Trade Division Daegu Metropolitan City. Daegu Metropolitan City; International Affairs & Trade Division. https://uclg-aspac.org/wp-content/uploads/2020/07/FinalOvercoming-COVID-19-in-Daegu_Korea_July-2020.pdf
- Republika.co.id. (2020). “Strategi Pemkot Bogor Pulihkan Ekonomi Akibat Dihantam Covid-19”. Retrieved from <https://www.ayobogor.com/read/2020/07/29/7956/strategi-pemkot-bogor-pulihkan-ekonomi-akibat-dihantam-covid-19>
- Salsabila, Annisa Putri. (2020). “Wih, Jawa Timur Punya Radar Covid-19 untuk Pantau Sebaran Virus Secara Real”. Retrieved from <https://hai.grid.id/read/072107749/wih-jawa-timur-punya-radar-covid-19-untuk-pantau-sebaran-virus-secara-real-tme>
- Sundworth, Jhon. (2020). “Coronavirus: Wuhan Emerges from The Harshest of Lockdowns”. Retrieved from <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-52197054>
- Syafri. (2020). “Pemkot Bogor Kembali Hidupkan Program JAGA ASA”. Retrieved from <https://www.berantasonline.com/pemkot-bogor-kembali-hidupkan-program-jaga-asa/>
- Tachi. (2020). “125 KK Terima Bantuan Sembako Dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pariaman”. Retrieved from <https://pariamankota.go.id/berita/125-kk-terima-bantuan-sembako-dari-dinas-pertanian-dan-perikanan-kota-pariaman>





- Tobing, Aldi Geri Lumban. (2020). "Dinas PM dan PTSP Optimalkan Layanan Online". Retrieved from <http://www.beritajakarta.id/read/78043/dinas-pm-dan-ptsp-optimalkan-layanan-online#.X4zrRu3gq01>
- Warta Kota. (2020). "Aplikasi untuk Warga Kota Bogor Mendaftar Agar Bisa Mendapat Bantuan Sosial Covid-19". Retrieved from <https://wartakota.tribunnews.com/2020/05/15/salur-aplikasi-untuk-warga-kota-bogor-mendaftar-agar-bisa-dapat-bantuan-sosial-covid-19?page=3>
- Widiyani, Rosmsha. (2020). "Update Mudah Data Virus Corona di Jawa Timur, Cek di Radar Covid 19 Jatim". Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-4977987/update-mudah-data-virus-corona-di-jawa-timur-cek-di-radar-covid-19-jatim>



Penambang Belerang Kaah Ijen.

Kawah Ijen berlokasi di Gunung Ijen, terletak diantara Kab. Banyuwangi dan Bondowoso. Namun lokasi kawah berada di Banyuwangi.

Masyarakat lokal masih mencari belerang sebagai mata pencaharian. Seain itu kawasan ini juga menjadi destinasi wisata minat khusus yang bisa dikunjungi dengan persyaratan tertentu dengan daya Tarik utama blue fire atau api biru yang bisa dilihat malam hari.

, Foto: Bastian AS & Tim

